

LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN WANITA



PERILAKU PEMBERIAN SUARA, AKSES DAN KONTROL
PEREMPUAN ETNIS CINA (TIONGHOA)
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 DI KOTA PADANG

MILITARY SERVICE MASSA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
9-12-2008
Ital

Oleh

KOLEKSI	: K1
NO. INVENTARIS	: 230/Ital/2008-p ¹¹
KLASIFIKASI	: 324.623 ALR p.1

Dra. Al Rafni, M.Si.

Drs. Suryanef, M.Si.

DIBIYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SESUAI DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN
NOMOR : 001/SP/PP/DP2M/III/2007
TANGGAL 29 MARET 2007

FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL/JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOPEMBER, 2007

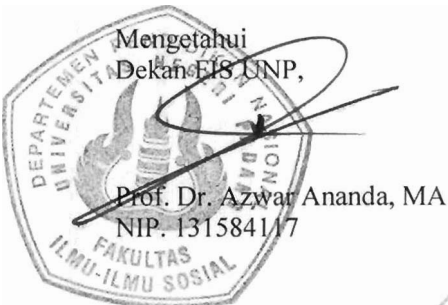
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang.
2. Bidang Ilmu Penelitian : Ilmu Politik.
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Al Rafni, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan.
 - c. NIP : 132 056 198
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa.
 - e. Jabatan : Lektor Kepala.
 - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu-ilmu Sosial Politik/Ilmu Sosial Politik.
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 orang.
5. Lokasi Penelitian : Kelurahan Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang.
6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan.
- a. Nama instansi : ----
 - b. Alamat : ----
7. Waktu penelitian : 7 bulan.
8. Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Padang, 12 Nopember 2007
Ketua Peneliti,



Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP. 132056198



Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNP,



Prof. Dr. H. Anas Yasin, MA.
NIP.130365634

RINGKASAN

A. Judul Penelitian

Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang.

Oleh : Al Rafni dan Suryanef.
Tahun Penelitian : 2007
Jumlah Halaman : xi + 51

B. Ringkasan Penelitian

Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina (etnis Tionghoa) di masa Orde Baru mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Mereka didiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan. Bahkan menurut Saputra (2001) masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Cina di kota-kota besar, termasuk perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau kambing hitam) kerusuhan massa atau pun tindak kekerasan.

Salah satu even politik yang banyak melibatkan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan etnis Cina adalah even pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pemilu turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Namun menurut Sanit (1998) massa pemilih di Indonesia lebih banyak menjadi objek politik dibandingkan sebagai subjek. Dengan adanya reformasi politik diharapkan marjinalisasi politik perempuan etnis Cina bergerak ke arah pencerahan kehidupan politik. Untuk itu menarik diteliti bagaimana perilaku pemberian suara, akses dan kontrol perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

Permasalahan penelitian diarahkan pada tiga hal berikut : (1) Bagaimana perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang? ; (2) Bagaimana akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang? ; dan (3) Sejauh mana kontrol yang dilakukan perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?

Selanjutnya dalam mengungkapkan jawaban atas tiga pertanyaan penelitian, maka hal-hal berikut dijadikan sebagai pijakan analisis : (1) Perilaku pemberian suara dalam Pemilu ; (2) Akses dan Kontrol dalam Politik ; dan (3) Perempuan Etnis Cina dalam Kehidupan Politik di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan lokus penelitian Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Responden penelitian adalah perempuan etnis Cina (Tionghoa) sejumlah 90 orang yang diambil menggunakan formula Frank Lynch (Surakhmad, 1989) dan juga laki-laki etnis Cina (Tionghoa) sejumlah 90 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Sementara itu analisis data dilakukan dengan metode statistik prosentase normal untuk data kuantitatif, analisis kualitatif dalam hal ini model interaktifnya Miles dan Huberman terhadap data kualitatif. Disamping itu juga digunakan analisis gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ternyata masih bersifat tradisional-mobilisasi walaupun telah terjadi perubahan format politik yang telah membuka peluang bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang politik. Sifat tradisional-mobilisasi tercermin dari alasan responden dalam menentukan pilihan atas partai politik yang disebabkan oleh saran keluarga dan pengaruh lingkungan.

Selanjutnya akses dalam pemilu, ternyata akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut : (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (d) menjadi juru kampanye ; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (f) menjadi tim sukses kandidat ; (g); terdaftar sebagai anggota partai ; (h) menjadi pengurus partai ; (i) menjadi relawan partai ; dan (j) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Hanya dalam tiga jenis akses yang dapat digolongkan tinggi yaitu : (1) ikut memilih dalam pemilu ; (2) memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan : dan (3) menjadi simpatisan/penggembara dalam kampanye. Walaupun pada dua kategori terakhir berada pada kategori cukup.

Sementara itu kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu paralel dengan rendahnya akses mereka terhadap pemilu. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD. Sementara itu dalam hal kontrol lainnya masih tergolong lemah. Dalam konteks ini tercakup kontrol terhadap hal-hal berikut : sebagai saksi dan

pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic*.

RESEARCH SUMMARY

A. Title

Voter's Behavior, Access, and Control of Chinese Women in Legislature General Election 2004 in Padang City

By : Al Rafni and Suryanef.
Years of Research : 2007
Sum of Pages : **xi + 51**

B. Research Summary

In New Order Era, Chinese-Indonesian citizen often undergo *double discrimination*. It is not only because of their minority ethnic existence but also because of their existence as women. Besides, according to Saputra (2001) there is still another discrimination (*triple discrimination*) for the Chinese, especially for them who live in big cities, including their women. They often become a target of mass riot or violence. They also often become the object of scapegoat.

One of the political events that often involving the women, including Chinese women, is general election. Everybody knows that the success of the general election is also determined by the women electoral participation. Unfortunately, according to Sanit (1998), the voters in Indonesia are often becoming the political object rather than the subject. Through the political reform, we hope that political marginalization of Chinese women will move to the improvement of political condition in Indonesia. Based on this issue, it is important to study the behavior, access, and control of Chinese women in legislature general election 2004 in Padang City.

The research questions of this study come as follows: (1) How is the voter behavior of Chinese women in legislature general election 2004 in Padang City?; (2) How is the access or the level of involvement of Chinese women in legislature general election 2004 in Padang City?; and (3) How is the control of the Chinese women in the implementation of legislature general election 2004 in Padang City?

Furthermore, there are some bases used in this research in answering the research question in this study, that is: (1) The voter behavior in general election, (2) Access and control in politic, and (3) Chinese women in political condition in Indonesia.

This study is analytical-descriptive with the locus of Kelurahan Pondok, Padang Barat sub-district, Padang City. Respondents consist of 90 Chinese women sampled through Frank Lynch formula (Surakhmad, 1989) and 90 Chinese men. Data were collected through questionnaire and interview. The quantitative data were analyzed with percentage statistic while qualitative data were analyzed with interactive model of Miles and Huberman. Besides, the data were also analyzed with gender analysis method.

The result of this study indicated that the voter behavior of Chinese women in legislature member election 2004 in Padang City is still in the form of traditional-mobilization even political format was changed and opened the chance for them to actualize themselves their political lives. The traits of traditional mobilization could be seen from the respondent reasons in their preferences to choose political parties based on their family suggestion and environmental influences.

Furthermore, in relation with their access in the legislature election, there were some indications that their access included in: (a) being voting committee; (b) involving in voting process; (c) being the witnesses in voting and clearing process; (d) being campaigners; (e) being the committee of the campaign; (f) being the team of candidate successful; (g); being involved as party members; (h) being party managers; (i) being party volunteers; and (j) being involved in the process of party recruitment by the party candidates. Their access were categorized as high in three sides of the election, that is participation in voting. While the access were categorized as sufficient in the struggle for women empowering and being followers in the campaign.

Besides, the control of the Chinese women in the election is parallel with their low access for the election. They only can control in giving consideration for choosing candidates, both for legislature and Local Managerial Council. While in the other sides their controls were categorized as weak or low. These control included in: being the witnesses and controller in the election, understanding the program of political party empowering the women, evaluating the implementation of their local election, and controlling the practices of money politics.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Andalas dengan surat perjanjian kerja Nomor : 135/J.16/PL/III/2007 Tanggal 29 Maret 2007, dengan judul *Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang*.

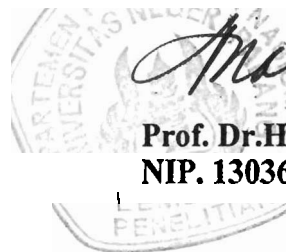
Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Oktober 2007
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr.H. Anas Yasin, M.A.
NIP. 130365634

PRAKATA

Penelitian ini merupakan langkah strategis untuk mengungkapkan bagaimana perilaku pemberian suara, akses dan kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang. Sangat diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi masukan berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik, perumusan kebijakan yang sensitif gender baik oleh pemerintah, khususnya partai politik dalam menyusun *platform* politik yang dapat menyerap aspirasi perempuan. Disamping itu juga sangat diharapkan terjadinya *special treatment* untuk membuka peluang bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) berkiprah dalam bidang politik.

Keberhasilan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, diantaranya dukungan finansial yang diberikan Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Departemen Pendidikan Nasional, dukungan administratif yang diberikan pihak Lembaga Penelitian UNP serta fakultas, kesediaan dan kesempatan yang diberikan oleh para responden penelitian untuk mengisi angket dan diwawancarai dalam rangka pengumpulan data. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang sangat tinggi untuk semua itu. Semoga dukungan yang telah diberikan dijadikan Allah SWT sebagai amal saleh di sisi Nya. Amin.

Selanjutnya sangat disadari apa yang telah dicapai melalui penelitian ini belumlah optimal sehingga akan dijumpai kelemahan dalam berbagai sisi. Oleh karena itu sangatlah terbuka kesempatan dari berbagai pihak untuk memberikan saran yang konstruktif bagi perbaikan penelitian ini.

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan kita semua.

Padang, 12 Nopember 2007

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Perilaku Pemberian Suara dalam Pemilu	6
B. Akses dan Kontrol dalam Politik	9
C. Perempuan Etnis Cina dalam Kehidupan Politik di Indonesia	16
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
BAB IV : METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Responden Penelitian	24
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpul Data	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	27
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH	69
C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	30
Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	30
Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	31
Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	31
Tabel 5 : Partai Politik Pilihan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004	32
Tabel 6 : Kandidat Caleg dan Calon Anggota DPD Pilihan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 7 : Alasan Responden Memilih Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2004	34
Tabel 8 : Faktor Penentu Pilihan Partai Responden dalam Pemilu Legislatif 2004	36
Tabel 9 : Akses atau Keterlibatan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang	38
Tabel 10 : Kontrol Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Curriculum Vitae Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta menunjukkan bahwa di belahan dunia mana pun, perempuan selalu termarginal dalam bidang politik. Sebut saja contohnya dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Sepanjang sejarahnya persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen yang paling tinggi berada di negara-negara Skandinavia (40%) sedangkan pada yang paling rendah berada di negara-negara Arab dengan persentase 4,6% (International IDEA, 2000). Sementara di Indonesia sepanjang sejarah pemilu-pemilu Orde Baru rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 12%. Kemudian pada pemilu 1999 dan 2004 keterwakilan perempuan masing-masing 9% dan 11%. Bila disigi lebih lanjut fenomena rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen juga ditemui dalam tataran lokal. Untuk Provinsi Sumatera Barat dari 605 kursi anggota DPRD, hanya 45 orang diantaranya perempuan. Fenomena termarginalnya perempuan di bidang politik juga ditemui dalam birokrasi, partai politik atau pun pemerintahan dalam arti yang luas.

Termarginalnya perempuan dalam bidang politik, jika dicari akar permasalahannya dapat dikategorikan ke dalam dua faktor, yaitu faktor inheren yang melekat pada diri perempuan itu sendiri dan faktor di luar diri perempuan tersebut. Salah satu faktor di luar diri perempuan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keterwakilan perempuan dalam politik adalah faktor struktur dan sistem politik dimana perempuan tersebut berinteraksi dengan dunia politik. Dengan kata lain intensitas keterlibatan perempuan dalam politik sangat diwarnai oleh model kepolitikan suatu negara dalam suatu masa (waktu).

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis yaitu mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo . Uhlir (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik, bersemayamnya ideologi patriarki dan menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik bagi partai pemerintah terutama menjelang pemilu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan mobilisasi politik yang dilakukan pemerintah dikenal dengan slogan “tiada hari tanpa penggalangan” dan “satu merekrut sembilan”. Mobilisasi politik yang dijalankan pemerintah terhadap perempuan berimplikasi terhadap format partisipasi politik perempuan era Orde Baru.

Khusus untuk kaum perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina (etnis Tionghoa) kondisi diperparah lagi oleh rezim Orde Baru dengan melakukan politik diskriminasi, sehingga kebebasan politik warga keturunan etnis Cina pun terbelenggu (Hendrik, 2003). Dengan demikian perempuan etnis Cina mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Mereka didiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan. Bahkan menurut Saputra (2001) masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Cina di kota-kota besar, termasuk

perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau kambing hitam) kerusuhan massa atau pun tindak kekerasan.

Marjinalisasi politik yang dialami perempuan etnis Cina ditenggarai dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa ketidakaktifan etnis Cina (termasuk perempuan) dalam bidang politik adalah bagian dari usaha mereka tidak menonjol dengan harapan dapat tetap mempertahankan posisi mereka di sektor ekonomi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa sumber-sumber politik secara formal memang sengaja disumbat oleh penguasa supaya mereka selalu bergantung kepada kekuasaan politik dan mereka bisa dijadikan 'sapi perah' ekonomi dan sekaligus 'kambing hitam' jika ada masalah-masalah sosial ekonomi yang akut (Saputra, 2001).

Bergulirnya reformasi politik membawa angin segar bagi kiprah perempuan Indonesia di dunia politik termasuk juga di dalamnya perempuan etnis Cina. Lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaan negeri ini menciptakan iklim yang secara relatif kondusif bagi perempuan etnis Cina untuk mengekspresikan kiprah politiknya.

Salah satu even politik yang banyak melibatkan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan etnis Cina adalah even pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pemilu turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Namun menurut Sanit (1998) massa pemilih di Indonesia lebih banyak menjadi objek politik dibandingkan sebagai subjek.

Dengan adanya reformasi politik diharapkan marjinalisasi politik perempuan etnis Cina bergerak ke arah pencerahan kehidupan politik. Untuk itu menarik diteliti bagaimana perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang. Artinya partai apa yang menjadi pilihan perempuan berikut

apakah kandidat perempuan atau laki-laki yang menjadi pilihan mereka, lalu apakah alasan mereka memberikan suaranya terhadap pilihan tersebut. Penelitian juga dilakukan terhadap akses dan kontrol perempuan etnis Cina dalam pemilu sehingga akan lebih tergambar bagaimana keterlibatan (akses) pada pemilu dan kontrol yang dilakukannya terutama pada tahapan-tahapan pemilu yang memerlukan intensitas keterlibatan yang tinggi dari konstituen.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?
2. Bagaimana akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?
3. Sejauh mana kontrol yang dilakukan perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?

Ruang lingkup permasalahan berangkat dari partisipasi politik perempuan etnis Cina dengan mengambil fokus even pemilu legislatif 2004 yaitu bagaimana perilaku pemberian suara, akses dan kontrol yang mereka lakukan dalam proses politik ini. Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan operasionalisasi konsep perilaku pemberian suara, akses dan kontrol sebagai kata kunci dari penelitian ini.

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang berakibat memihaknya pemilih pada suatu partai politik yang menjadi kontestan pemilu.

Dalam kaitan ini akan dilacak partai pilihannya, calon legislatif dan calon DPD yang dipilih, alasan memilih, dan faktor yang menentukan dalam memilih partai politik.

Selanjutnya, akses adalah ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Hal ini akan dicermati melalui hal-hal sebagai berikut : (1) akses pada tahap pemungutan dan penghitungan suara meliputi : ikut memilih, menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses penghitungan suara, menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (2) akses pada tahapan kampanye meliputi : menjadi juru kampanye, panitia pelaksana, menjadi simpatisan/penggembira, menjadi tim sukses kandidat, dan memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (3) akses terhadap partai politik meliputi : terdaftar sebagai anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, dan mengikuti proses rekrutmen calon legislatif.

Sementara itu, kontrol diartikan sebagai kemampuan melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan yang dilakukan. Kontrol akan dicermati melalui hal-hal sebagai berikut : pertimbangan dalam memilih kandidat, saksi dalam pemilu, pemantauan dalam pemilu, mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS, dan mengawasi peluang terjadinya *money politic* dalam kegiatan pemilu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perilaku Pemberian Suara dalam Pemilu

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang berakibat memihaknya pemilih pada suatu partai yang menjadi kontestan pemilu. Dalam Ilmu Politik, untuk memahami bagaimana perilaku pemberian suara merujuk kepada teori *voting behavior*.

Di dalam kepustakaan tentang *voting behavior* terdapat dua mazhab yang menjadi sumber kajian. Kedua mazhab tersebut adalah Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan. Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor sosiologis di dalam membentuk perilaku politik seseorang. Sementara itu mazhab yang kedua lebih memperhatikan faktor psikologis dari seseorang individu di dalam menentukan pilihan politiknya. Mazhab pertama dikenal sebagai model atau pendekatan sosiologis dan yang kedua dikenal sebagai model atau pendekatan psikologis.

Pendekatan sosiologis mencermati perilaku memilih dari dimensi norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian pemahaman terhadap pengelompokan sosial, baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik. Oleh karena itu pendekatan ini beranggapan bahwa preferensi politik seseorang terhadap salah satu partai politik merupakan produk dari karakter sosial

ekonomi individu yang bersangkutan (Gaffar, 1992). Dengan kata lain pola memilih seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya.

Dari beberapa peneliti *voting behavior* yang menggunakan pendekatan sosiologis dapat diambil suatu pengertian bahwa pendekatan ini lebih menekankan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku memilih seperti status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, agama, kelas, faktor geografis dan sebagainya. Pendekatan ini selalu menekankan pengelompokan sosial sebagai faktor yang menentukan preferensi politik.

Pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan psikologis berangkat dari asumsi penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri individu sebagai produk dari proses sosialisasi. Oleh sebab itu konsep sikap dan sosialisasi merupakan hal yang amat penting dalam pendekatan ini.

Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialaminya sepanjang hidup. Sosialisasi adalah proses dimana individu secara pasif menerima nilai-nilai, sikap-sikap, peranan-peranan dalam masyarakatnya, sekaligus secara aktif mengembangkan pola kemandiriannya untuk menempatkan diri dan berperan dalam masyarakat di mana seseorang itu hidup. Sedangkan sosialisasi politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik dan juga merupakan sarana bagi generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya (Almond (ed.), 1974). Dengan demikian, pendekatan ini percaya pada apa yang disebut sebagai “agen” dari sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah,

teman bermain, media massa, partai politik dan organisasi massa, tempat bekerja dan sebagainya.

Melalui proses sosialisasi politik tersebut terbentuk ikatan psikologis seseorang dengan salah satu partai atau organisasi politik tertentu yang berwujud simpati terhadap organisasi atau partai politik tersebut. Ikatan psikologis inilah yang disebut identifikasi kepartaian (*party identification*). Identifikasi partai ini merupakan konsep yang amat penting dalam pendekatan psikologis. Mereka berpendapat bahwa identifikasi partai merupakan faktor penjas yang dominan terhadap perilaku memilih (*voting behavior*). Sebagaimana pengakuan Czudnowski (1976) berikut ini, *“this approach also particulary adequate for the analysis of voting in the United States, where “party identification” has been found to be the single most important variable determining voting preferences.”*

Pemaparan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa bagi penganut pendekatan psikologis sudah menjadi aksioma adanya hubungan pengaruh antara identifikasi kepartaian dengan perilaku memilih. Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas yang dibentuk oleh pengalaman (sosialisasi) sepanjang hidup.

Dengan demikian perilaku pemberian suara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *pada partai apa perempuan etnis Cina memberikan suaranya dalam pemilu legislatif 2004 dan sekaligus kandidat perempuan atau laki-laki kah yang menjadi pilihan mereka, lalu apa alasan dan faktor yang menyebabkan mereka memilih partai tersebut bila ditinjau dari sudut sosiologis atau psikologis?*

B. Akses dan Kontrol dalam Politik

Berbicara tentang akses dan kontrol merupakan dua hal yang menjadi inti dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan pemerataan hak-hak politik bagi seluruh rakyat atau warga negara dan dimungkinkannya seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan. Selain itu, partisipasi politik juga berarti bahwa keputusan-keputusan politik dalam pembangunan bertujuan pada distribusi kekuasaan politik yang lebih egaliterian. Sedangkan pada tingkat yang paling dasar, partisipasi politik tercermin dalam peran serta masyarakat dalam partai politik, serikat pekerja dan lain-lain (Amien Rais dalam Alfian, dkk., 1988).

Timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, menurut Myron Weiner disebabkan oleh lima hal berikut, yaitu : *pertama, terjadinya modernisasi* yang mengakibatkan peningkatan terhadap pendidikan, pengembangan media komunikasi massa, urbanisasi yang meningkat dan sebagainya yang menjadikan masyarakat menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. *Kedua*, perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Terbentuknya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas sebagai akibat proses modernisasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. *Ketiga*, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Adanya ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme yang ditransformasikan kaum intelektual yang penyebarannya didukung oleh sistem-sistem komunikasi modern telah membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. *Keempat*, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Timbulnya konflik dalam

memperebutkan kekuasaan menyebabkan kelompok-kelompok yang bertikai mencari dukungan rakyat. Dengan cara ini mereka menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini dipenuhi. *Kelima*, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ke segala segi kehidupan sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu tidak berdaya menghadapi bahkan mudah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin saja merugikan kepentingannya (Mas'ood dan Colin MacAndrews, 1989).

Sementara itu Huntington dan Nelson (1976) menyatakan partisipasi politik dengan *"we define political participation simply as activity by private citizens designed to influence governmental decision making."* Dengan kata lain, partisipasi politik digambarkan sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Ilmuwan politik lainnya seperti Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Budiardjo, 1981) memberikan batasan bahwa :

"Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan umum (the term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).

Sedangkan Miriam Budiardjo (1981) memberikan definisi umum dari partisipasi politik sebagai "kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara

dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.”

Lebih jauh ia juga memberikan gambaran bahwa partisipasi politik itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara ini secara garis besar mempunyai dua sasaran yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Berdasarkan berbagai batasan partisipasi politik yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu *pertama*, partisipasi politik merupakan tindakan yang bersifat legal, dalam arti dilindungi oleh aturan hukum yang berlaku sehingga merupakan sesuatu yang sah dan diterima dalam suatu negara yang demokratis. *Kedua*, partisipasi politik berbeda dengan sikap dan perilaku politik. Sikap politik merupakan *psychological disposition* (watak psikologis) daripada seseorang dan perilaku politik tidak selamanya berkaitan dengan suatu tujuan yang hendak dicapai. Sementara itu partisipasi politik berkaitan erat dengan usaha dari individu untuk mencapai suatu tujuan. *Ketiga*, partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan oleh warga masyarakat kebanyakan, bukan berkaitan dengan tindakan politisi profesional seperti tokoh partai-partai politik, anggota lembaga perwakilan rakyat, dan tokoh kelompok kepentingan. *Keempat*, partisipasi politik berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang bersifat mandiri, bukan kegiatan yang semata-mata bersifat seremonial atau pun yang digerakkan dari atas, baik oleh pemerintah maupun

kalangan elit lainnya. *Kelima*, partisipasi politik merupakan kegiatan mempengaruhi pemerintah yang bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa perantara, sedangkan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.

Aktivitas yang disebut partisipasi politik dapat mengambil wujud beraneka ragam. Gabriel Almond misalnya, secara garis besar membagi partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yaitu *konvensional* dan *non-konvensional*. Bentuk konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang normal atau legal. Pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif adalah beberapa bentuk konvensional. Sedangkan bentuk partisipasi politik yang non-konvensional mencakup yang legal seperti pengajuan petisi, mau pun ilegal seperti konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda dan manusia dan sebagainya. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dijadikan ukuran penilaian stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, serta kepuasan atau ketidakpuasan warga negara (Mas'ood dan Colin MacAndrews, 1989).

Sementara itu, Huntington dan Nelson menurut Afan Gaffar dalam tulisannya *Partisipasi Politik di Indonesia* menggolongkan partisipasi politik ke dalam bentuk kegiatan yang disebutnya *electoral activities*, *lobbying*, *organizational activities*, *contacting* dan *violence* (Prospektif No.1 Volume 3, 1991). Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas masing-masing bentuk kegiatan partisipasi politik tersebut.

1. *Electoral activities*, yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan,

kampanye, pemberian suara, dan juga penghitungan suara.

2. *Lobbying*, yaitu aktivitas individual ataupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang sesuatu hal. Biasanya tindakan ini diharapkan untuk memperoleh dukungan atau pun untuk menciptakan oposisi
3. *Organizational activities*, yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap suatu organisasi tersebut, dan terlibat dalam aktivitas organisasi untuk mempengaruhi pemerintah.
4. *Contacting*, yaitu tindakan individu yang menghubungi secara langsung pejabat pemerintah untuk menyampaikan segala sesuatu persoalannya.
5. *Violence*, atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa bahkan kekerasan politik dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi politik. Biasanya tindakan seperti ini dijalankan kalau saluran untuk menyampaikan aspirasi politik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Ilmuwan politik lainnya, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori. *Pertama, apatis* artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua, spektator* artinya orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. *Ketiga, gladiator* artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. *Keempat, pengeritik* yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Berbeda dengan Milbrath dan Goel, Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dia membagi partisipasi politik menjadi enam lapisan, yaitu *pemimpin politik, aktivis politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan*

informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal (orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik), dan orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik) (Surbakti, 1992).

Lain lagi dengan Nazaruddin Sjamsuddin (1988) yang mengkategorikan partisipasi politik ke dalam tipologi *dukungan* dan *gugatan terhadap sistem politik*. Bentuk partisipasi politik yang mendukung sistem politik terlihat dari keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu yang dianjurkan pemerintah. Bentuk dukungan semakin nyata apabila anggota masyarakat memilih partai pemerintah di dalam pemilu mau pun melaksanakan setiap anjuran pemerintah. Selanjutnya partisipasi politik yang berbentuk gugatan adalah mengancam atau mengoreksi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dalam bentuk protes, demonstrasi atau pun memboikot anjuran pemerintah.

Paparan di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa partisipasi politik dapat mengambil berbagai bentuk dengan ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari pembuatan keputusan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik, pemilu, diskusi politik, keanggotaan dalam partai dan kelompok politik, kontak dengan pejabat politik dan pemerintahan sampai dengan tindakan-tindakan politik dalam bentuk kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, kudeta, revolusi dan lain-lain.

Partisipasi warga masyarakat termasuk perempuan berada dalam konteks *governance*, yakni relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Dari sudut pandang negara, partisipasi sebagai bagian dari prinsip demokrasi merupakan upaya untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif. Sementara itu dari sisi masyarakat, partisipasi memberi ruang dan kapasitas untuk

memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa serta membangun kemandirian masyarakat.

Berbicara tentang makna substantif dari partisipasi, Sutoro Eko (2004) menegaskan bahwa makna terdalam partisipasi adalah *voice*, akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan kehidupannya. Lebih jauh Eko (2004) memberi kejelasan terhadap makna substantif partisipasi itu sebagai berikut :

Pertama, *voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses : keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan dan lain-lain.

Ketiga, kontrol merupakan kemampuan warga melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Beranjak dari pemaparan esensi partisipasi sebelumnya dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik akan menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Artinya perempuan bukanlah sebagai hamba (*client*) tetapi sebagai warga (*citizen*) sehingga ia adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak untuk memiliki. Selain itu perempuan sebagai bagian dari segmen masyarakat juga akan menjadi *partner* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk tidak menjadi sekadar objek pasif penerima kebijakan melainkan sebagai subjek aktif menentukan kebijakan.

C. Perempuan Etnis Cina dalam Kehidupan Politik di Indonesia

Membicarakan keterlibatan perempuan Etnis Cina dalam kehidupan politik di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari kajian seputar keterlibatan perempuan Indonesia secara umum dalam bidang politik. Uniknya adalah bahwa keterlibatan perempuan etnis Cina di Indonesia mengalami marginalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka termarginalisasi dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarginalisasi di kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Cina di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang (Freedman, 2000).

Walaupun sebagai etnis minoritas namun jaminan hukum atas aktifitas politik mereka tetap sama sebagaimana pemerintah memberikan jaminan yuridis formal melalui beberapa regulasinya kepada seluruh WNI tanpa kecuali. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan dan laki-laki WNI untuk masuk ke dunia politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa peraturan perpolitikan di Indonesia yang memberikan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.

230/11d/2008 - P⁽¹⁾

324.623
ALR
P.1

- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing (Isbodroini Suyanto, 2003).

Namun geliat perempuan itu sangat dipengaruhi oleh seting politik penguasa. Di masa parlementer, organisasi perempuan masih mempunyai kebebasan bergerak meskipun masih berada di bawah payung satu partai. Sedangkan di masa Demokrasi Terpimpin, organisasi politik perempuan menjadi berkurang dengan diperkecilnya jumlah partai politik. Tetapi organisasi perempuan di luar partai tidak dilarang untuk tumbuh. Di masa Orde Baru di mana kekuasaan menjadi sangat terpusat perempuan telah didomestikasi secara sistematis oleh negara. Domestikasi dilakukan melalui tindakan mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output yang berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan.

Mempolitisasi perempuan dalam arti menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik partai-partai politik. Kegiatan-kegiatan atau organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan kesejahteraan sosial dan keluarga sehingga PKK pun disebut sebagai gerakan perempuan non politik. Untuk menjaga harmoni dan kestabilan politik, pemerintah mengkooptasi seluruh bentuk-bentuk perwakilan menurut fungsi dan profesi seperti halnya KOWANI.

Struktur korporatisme menurut *Philippe C. Schmitter* (Stepan, 1978), diciptakan untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik kelas. Dalam sistem korporatisme ini pemerintah berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas seluruh organisasi dan menentukan hidup-matinya organisasi. Keadaan ini

diperkuat lagi dengan adanya *Panca Tugas* yang dirumuskan oleh Menteri Urusan Peranan Perempuan yaitu (1) sebagai istri yang membantu suami ; (2) sebagai ibu yang mengasuh anak dan mendidik mereka ; (3) sebagai manajer di dalam mengelola rumah tangga bagi suami dan anak ; (4) sebagai pekerja dalam berbagai sektor ; dan (5) sebagai anggota organisasi (Abdullah, 1997). Dari *Panca Tugas* ini tercermin negara menerapkan ideologi *ibuisme* (Murniati, 1998) yang menempatkan perempuan sebagai ibu utama dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

Ideologi tersebut memosisikan perempuan sebagai makhluk yang penuh cinta kasih dan selalu berkorban demi orang lain. Ideologi tersebut kemudian secara politis dimanipulasi untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifikasi perempuan. Senada dengan konsep *ibuisme*, *Mies* (Abdullah, 1997) menggunakan istilah *housewifization* untuk menunjukkan suatu kondisi dimana perempuan sebagai ibu rumah tangga dianggap peran utama sehingga segenap aspek kehidupan perempuan sangat diwarnai oleh anggapan ini.

Ideologi tersebut melokalisasi perempuan seputar aktivitas domestik serta membatasi geraknya di sektor lain. Ideologi *ibuisme* diciptakan oleh negara dalam rangka melestarikan ideologi patriarki yang identik dengan negara dan laki-laki. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse dan Anders Uhlén, 1996).

Khusus terhadap etnis Cina (baik perempuan dan laki-laki) rezim Orde Baru selain menerapkan kebijakan politiknya terhadap perempuan WNI secara umum sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, juga melakukan politik diskriminasi. Secara historis politik diskriminasi ini sebenarnya warisan dari penjajah Belanda

yang membagi warga negara menjadi tiga, sebagaimana termuat dalam *Reegerings Reglement* jo *Indische Staatregeling* dan *Nederlandsche Ouderdaan Schap van Niet Nederlands* (Kusuma, 2002). Warga negara kelas pertama disebut *privileg* yaitu orang-orang keturunan Eropa. Sementara warga negara kelas dua ialah bangsa Timur Jauh yang didalamnya terdapat etnis Cina dan Arab. Sedangkan warga negara kelas tiga adalah Boemi Poetra. Pada masa Orde Lama dikeluarkan pula politik diskriminatif dengan Peraturan No.10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatantra I dan II (daerah tingkat I dan II). Rezim Orde Baru mengeluarkan Keppres No.52 tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk, dengan mewajibkan keturunan etnis Cina mengisi model K-1. Hal ini kemudian diperkuat oleh SKBRI Peraturan Menteri Kehakiman No.JB3/4/12 tahun 1978 (Hendrik, 2003). Peraturan-peraturan diskriminatif ini tentu mempengaruhi proses kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik.

Secara umum partisipasi politik etnis Cina di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Cina (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Cina antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw) (Suryadinata, 1992). Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom)

yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan strategi mereka mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik (Saputra, 2001).

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Cina pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perilaku pemberian suara perempuan etnis cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
2. Akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
3. Kontrol yang dilakukan perempuan etnis cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

B. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Pusat kajian wanita untuk menyusun strategi dan pedoman kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan khususnya di bidang politik.
2. Para pembuat kebijakan agar meletakkan kepentingan politik perempuan sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian, khususnya perempuan etnis minoritas seperti etnis Tionghoa (Cina).
3. Partai politik dalam rangka menyerap aspirasi perempuan khususnya perempuan etnis Tionghoa (Cina) sehingga dapat menyusun *platform* politik yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dari perempuan khususnya dan dinamika masyarakat pada umumnya.
4. Pengembangan kepustakaan/teori dalam ilmu politik, khususnya tentang gender dan politik, khususnya dalam hal perilaku pemberian

suara, akses atau tingkat keterlibatan, dan kontrol yang dilakukan perempuan etnis cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh (*whole*) dan tuntas (*exhaustive*) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Menurut *Masri Singarimbun* (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis mencoba mencermati gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, khususnya fenomena politik. Sedangkan *Vredenberg* (1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya, jenis penelitian ini berusaha menjawab apa penjelasan yang terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan penelitian. Disamping itu sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian berperspektif gender.

Menurut *Amal* penelitian yang berperspektif gender adalah penelitian yang berusaha mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pula hubungan gender didalamnya (*Ihromi*, 1995). Sedangkan tujuan penelitian berperspektif gender antara lain adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak saja mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan praktis gender saja tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan strategis gender

(Moser, 1989). Penelitian seperti ini menggunakan pendekatan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Hal ini beranjak dari realitas bahwa di kelurahan ini lah terdapat mayoritas etnis Cina di Kota Padang.

C. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah perempuan etnis Cina. Jumlah responden penelitian ditetapkan dengan menggunakan formula Frank Lynch sebagai berikut :

$$n = \frac{NZ \cdot p (1 - P)}{Nd + Z (1 - P)}$$

dimana :

n	=	jumlah sampel/responden
N	=	jumlah populasi
Z	=	nilai variabel normal (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%
p	=	harga patokan tertinggi (0,50)
d	=	sampling error (0,10) (Surakhmad, 1989).

Sehubungan dengan jumlah populasi dalam hal ini perempuan etnis Cina (Tionghoa) 2.655 orang, maka jumlah sampel penelitian ini berdasarkan formula Frank Lynch tersebut adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{2.655 \cdot (1,96)^2 \cdot (0,50)^2 \cdot (1 - 0,50)}{2.655 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot (1 - 0,50)} \\ &= \frac{2.655 \cdot (3,8416) \cdot (0,50) \cdot (0,50)}{2.655 \cdot (0,01) + (3,8416) \cdot (0,50)} \end{aligned}$$

$$= \frac{2.549,862}{26,55 + 1,9208}$$

$$= 89,56$$

Dari hasil penghitungan yang dilakukan, maka diperoleh jumlah sampel adalah 90 orang. Selanjutnya untuk mengungkapkan ada-tidaknya perbedaan perilaku pemberian suara, akses dan kontrol antara perempuan dengan laki-laki etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004, maka juga akan diambil laki-laki etnis Cina sebagai responden penelitian dengan proporsi yang berimbang yaitu 90 orang.

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung dari responden penelitian terdiri dari data : (1) perilaku pemberian suara ; (2) akses ; dan (3) kontrol yang dilakukan dalam pemilu legislatif 2004. Disamping itu juga data sekunder mengenai hal-hal yang menunjang upaya pengungkapan jawaban dan pertanyaan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner berisi daftar pernyataan bersifat terbuka dan tertutup. Disamping itu juga dilakukan wawancara untuk mendalami pernyataan terbuka yang diberikan responden untuk mengelaborasinya lebih dalam. Sedangkan data sekunder melalui *review literature* serta studi dokumenter.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kuantitatif dengan menggunakan persentase normal yaitu :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

dimana :

P = persentase yang dicari
f = frekuensi
N = jumlah responden (Yusuf, 1985).

Sementara itu data-data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) sebagai berikut : (1) reduksi data ; (2) penyajian data ; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi ; (4) merumuskan temuan.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian jenis penelitian bahwa penelitian ini juga berperspektif gender sehingga analisis gender juga digunakan dalam penelitian ini.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan dua bagian penting dari penelitian yang dilakukan. *Pertama*, temuan umum berupa gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik responden. *Kedua*, temuan khusus sekaligus pembahasan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu :

1. Perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
2. Akses atau tingkat keterlibatan perempuan Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.
3. Kontrol yang dilakukan perempuan Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

A. Temuan Umum

1. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian metode penelitian bahwa lokasi penelitian dipilih Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat. Hal ini disebabkan oleh karena mayoritas etnis Cina (Tionghoa) Kota Padang berdomisili di sini. Masyarakat Kota Padang bahkan menyebut kawasan ini dengan *pecinan*.

Perkampungan Cina Kota Padang atau dikenal dengan wilayah Pondok pada awalnya mulai dibangun pada tahun 1673 seiring dengan kedatangan imigran Cina yang dibawa oleh VOC sebagai tenaga kerja. Menurut Freek Colombijn (dalam Erniwati, 2007) komunitas Cina ini semakin meningkat sejak pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1682 mengangkat Lie Maa Saay sebagai Letnan Tionghoa pertama di Padang untuk mengkoordinasikan kehidupan mereka. Keturunan etnis

Cina di Kota Padang terdiri dari berbagai suku. Diantaranya yang terbesar terbagi menjadi tiga kelompok suku ataupun dialek bahasa, yaitu kelompok Hokkian yang merupakan kelompok terbesar sekitar 80%, kelompok Hakka sekitar 3%, dan kelompok Kwangtung sekitar 15%. Kelompok-kelompok ini dalam pergaulan sehari-hari membentuk suatu ikatan sesamanya. Hokkian akan membentuk ikatan keluarga Hokkian, Hakka juga demikian dan begitu seterusnya. Selain ikatan keluarga, mereka juga membentuk ikatan-ikatan perhimpunan di bidang kesenian, kematian, sampai pada perhimpunan tradisional dan arisan.

Kelurahan Kampung Pondok berada dalam wilayah Kecamatan Padang Barat dan merupakan hasil penggabungan wilayah dan administrasi dari beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Pondok, Kelurahan Tanah Kongsi, Kelurahan Kalikecil, Kelurahan Kampung Dobi, dan Kelurahan Simpang Enam. Kelurahan ini memiliki wilayah dengan luas 39 ha dan berbatasan dengan : sebelah utara dengan Kelurahan kampung Jao Kecamatan Padang Barat, sebelah selatan dengan Kelurahan Batang Arau Kecamatan Padang Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Belakang Tangsi dan Kelurahan Berok Nipah. Sementara itu sebelah timur dengan Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan.

Kelurahan Pondok memiliki ketinggian 1,5 meter dari permukaan laut. Sementara jarak dari pusat pemerintahan kecamatan \pm 1,5 km, dari pusat kota \pm 1 km, dan dari pusat provinsi \pm 2 km. Wilayah ini berpenduduk 6.850 jiwa, yang terdiri dari 3.275 orang laki-laki dan 3.575 orang perempuan. Penduduk WNI keturunan etnis Cina menurut penjelasan yang disampaikan aparat kelurahan adalah sekitar 4.796 orang dengan komposisi 2.655 orang diantaranya perempuan dan sisanya sejumlah 2.141 orang adalah laki-laki.

Menurut Sekretaris Kelurahan :

“Sejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) Kewarganegaraan terbaru, tidak ada lagi pembedaan antara warga negara pribumi dan keturunan. Oleh sebab itu kami tidak punya catatan lengkap tentang jumlah WNI keturunan Cina. Namun dari jumlah penduduk, sekitar 75% adalah warga keturunan terutama 98% mereka berada di sekitar bekas Kelurahan Kalikecil dan Tanah Kongsu”.

Melihat kondisi yang demikian, wajarlah bila visi Kelurahan Pondok tersebut adalah terwujudnya pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan budaya yang madani. Agama yang dianut oleh penduduk adalah sebagai berikut : (1) Islam (22,22%) ; (2) Kristen (2,99%) ; (3) Katholik (60%) ; (4) Hindu (4,77%) ; dan Budha (10,02%). Sementara itu 66,1% penduduk masih aktif menjalani proses pendidikan yang stratifikasinya terdistribusi sebagai berikut : (1) TK (2,71%) ; (2) SD (14,19%) ; (3) SLTP (11,9%) ; (4) SLTA (33,37%) ; (5) Diploma (1,64%) ; dan (6) Sarjana (2,29%). Sementara pekerjaan penduduk pada umumnya atau sekitar 75% diantaranya adalah swasta dan wira swasta

2. Karakteristik Responden

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang menggunakan Formula Frank Lynch, diperoleh sampel sejumlah 90 orang perempuan etnis Cina. Sehubungan dengan penelitian ini juga menggunakan analisis gender, maka penelitian ini juga melibatkan sejumlah 90 orang laki-laki etnis Cina. Adapun karakteristik responden ditinjau dari segi umur, agama, pekerjaan, dan pendidikan terakhir akan dipaparkan berikut ini.

Ditinjau dari segi umur, maka distribusi responden tergambar pada tabel berikut.

Tabel 1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	≤ 23	22	24,44	28	31,11
2.	24 - 35	31	34,44	29	32,22
3.	36 - 47	17	18,89	12	13,33
4.	48 - 59	12	13,33	7	7,78
5.	≥ 60	8	8,9	14	15,56
Jumlah		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa proporsi terbesar dari responden perempuan berada pada umur 24 - 35 tahun yaitu 34,44%, kemudian umur ≤ 23 tahun 24,44%, dan yang terkecil adalah berumur ≥ 60 tahun sebesar 8,9%. Hampir sama dengan kondisi responden perempuan, responden laki-laki proporsi terbesarnya juga berada pada lapisan umur yang sama dengan proporsi yang berimbang untuk umur ≤ 23 tahun dan umur 24 - 35 tahun, masing-masing 31,11% dan 32,22%. Sementara itu proporsi terkecil adalah responden berumur 48 – 59 tahun yaitu 7,78%. Sedangkan gambaran tentang agama yang dianut responden dapat dicermati melalui tabel 2.

Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

No.	Agama	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Katholik	66	73,33	46	51,11
2.	Budha	15	16,67	39	43,33
3.	Kristen	9	10	5	5,56
Jumlah		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Data yang direkam oleh tabel 2 memberi penjelasan bahwa mayoritas responden, baik perempuan maupun laki-laki adalah beragama Katholik. Hanya saja penganut agama Budha di kalangan responden laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Sementara itu penganut agama Kristen jumlahnya relatif kecil, baik untuk responden perempuan maupun laki-laki.

Berikutnya bagaimana distribusi responden menurut jenis pekerjaan terangkum pada tabel 3.

Tabel 3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Rumah tangga	56	62,22	0	0
2.	Mahasiswa	12	13,33	16	17,78
3.	Dagang	12	13,33	49	54,44
4.	Swasta	10	11,12	14	15,55
5.	Wiraswasta	0	0	11	12,23
J u m l a h		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Data tentang pekerjaan responden sebagaimana diungkapkan oleh tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu 62,22%, sementara itu untuk pekerjaan sebagai mahasiswa, dagang, dan swasta berimbang. Sementara itu tidak satu pun diantara mereka yang berwiraswasta. Pada responden laki-laki, pekerjaan sebagai pedagang justru muncul sebagai segmentasi yang mayoritas yaitu 54,44% dan yang terkecil adalah mereka yang berwiraswasta sebesar 12,23%.

Selanjutnya bagaimana penyebaran responden ditinjau dari tingkat pendidikan terungkap melalui tabel 4.

Tabel 4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	5	5,55	0	0
2.	SLTP	21	23,33	11	12,22
3.	SLTA	45	50	56	62,22
4.	Diploma	15	16,67	9	10
5.	Sarjana	4	4,45	14	15,56
J u m l a h		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Tabel 4 menunjukkan bahwa lapisan terbesar dari responden, baik perempuan maupun laki-laki berpendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 73,33% untuk perempuan dan 74,44% laki-laki. Sementara itu relatif kecil proporsi responden yang berpendidikan SD. Di samping itu data yang ada juga menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki yang berpendidikan sarjana jauh lebih besar dibandingkan perempuan, dengan proporsi hampir 4 berbanding 1.

B. Temuan Khusus

Pemaparan berikut ini berhubungan dengan tiga persoalan utama yang menjadi fokus kajian penelitian ini yaitu (1) perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ; (2) akses perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ; dan (3) kontrol perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang .

1. Perilaku Pemberian Suara Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dijaring melalui pertanyaan yang terkait dengan : (a) partai apa yang menjadi pilihan perempuan dalam pemilu legislatif 2004 ; (b) kandidat (caleg atau calon anggota DPD) yang perempuan atau laki-laki yang menjadi pilihan mereka ; dan (c) apa alasan mereka memilih partai tersebut bila ditinjau dari sudut sosiologis dan psikologis.

Distribusi jawaban responden diungkapkan melalui tabel 5, 6, dan 7 berikut ini.

Tabel 5 : Partai Politik Pilihan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Nama Partai Politik	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	17	18,89	30	33,33
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	15	16,67	7	7,78
3.	Partai Demokrat (PD)	6	6,67	8	8,89
4.	Partai Damai Sejahtera (PDS)	52	57,77	40	44,44
5.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	5	5,56
J u m l a h		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Tabel di atas memperlihatkan dari 24 partai politik yang menjadi kompetitor pemilu legislatif 2004, ternyata hanya ada empat partai politik yang menjadi pilihan

responden perempuan, yaitu PDS, PDI-P, Partai Golkar, dan PD. Keempat partai politik juga menjadi pilihan responden laki-laki. Hanya saja sejumlah kecil yaitu 5,56% responden laki-laki juga memilih Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Sementara tak satu pun diantara responden perempuan yang memilih partai ini. Bila dicermati lebih lanjut, preferensi politik kebanyakan responden baik perempuan maupun laki-laki adalah PDS dan PDI-P. Dalam konteks ini, PDS mendapat dukungan mayoritas responden. Walaupun demikian terdapat perbedaan yang mencolok untuk proporsi dukungan terhadap PDI-P, yaitu sejumlah 18,89% di kalangan responden perempuan dan 33,33% laki-laki. Hal lain yang juga perlu dicatat dari data yang ada, terhadap Partai Golkar ternyata responden perempuan lebih menaruh kepercayaan dibandingkan laki-laki.

Selanjutnya apakah yang menjadi pilihan responden adalah kandidat (caleg dan calon anggota DPD) perempuan atau laki-laki? Jawabannya terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 : Kandidat Caleg dan Calon Anggota DPD Pilihan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pilihan Kandidat	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Caleg/anggota DPD Perempuan	18	20	8	8,89
2.	Caleg/anggota DPD laki-laki	25	27,78	59	65,55
3.	Tidak mempertimbangkan jenis kelamin	47	52,22	28	25.56
J u m l a h		90	100	90	100

Temuan empiris yang ada pada tabel 6 menegaskan bahwa mayoritas responden perempuan sejumlah 52,22% tidak menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan caleg/anggota DPD. Hal yang menarik lainnya adalah fakta yang menunjukkan bahwa responden perempuan ternyata lebih banyak memilih caleg/anggota DPD laki-laki dibanding perempuan itu sendiri. Di kalangan responden laki-laki justru mayoritas dari mereka yaitu 65,55%

menjatuhkan pilihan atas caleg/anggota DPD laki-laki dan kecil sekali proporsi (hanya 8,89%) yang memilih caleg/anggota DPD perempuan. Walaupun demikian sejumlah 25,56% diantaranya juga tidak mempersoalkan jenis kelamin dari para caleg/anggota DPD yang akan dipilih.

Selanjutnya untuk mengetahui apa alasan responden memilih suatu partai dapat dicermati melalui sebaran jawaban yang ada pada tabel 7.

Tabel 7 : Alasan Responden Memilih Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Alasan	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		ya	tidak	ya	tidak
1.	Ideologi partai politik sesuai dengan agama yang dianut.	52	38	40	50
2.	Partai politik tersebut adalah partai yang reformis.	50	40	60	30
3.	Sesuai dengan aspirasi politik yang dimiliki.	35	55	74	16
4.	Partai politik tersebut memperjuangkan kepentingan perempuan.	18	72	8	82
5.	Menjadi pengurus partai politik tersebut.	0	90	0	90
6.	Partai politik tersebut disegani dan terikat dengannya.	12	78	9	81
7.	Partai politik tersebut adalah pilihan orang tua, suami/istri, kerabat, atau atasan.	40	50	8	82

Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan temuan empiris sebelumnya, terdapat tiga alasan yang menonjol mengapa responden perempuan memberikan suaranya pada partai tertentu. Ketiga alasan tersebut sebagai berikut : *Pertama*, partai politik pilihannya memiliki ideologi sesuai dengan agama yang dianut. Ini ditunjukkan oleh 57,78% jawaban responden yang berada pada kategori ini. *Kedua*, 55,55% menyatakan bahwa partai politik pilihannya adalah partai yang reformis, dan alasan *ketiga*, adalah sejumlah 44,44% responden menyatakan bahwa partai politik tersebut sesuai merupakan pilihan orang tua, suami, kerabat, atau atasannya. Masih dalam konteks apakah yang menjadi alasan dalam memilih partai politik, ternyata sejumlah 71 (78,89%) responden

perempuan tidak menyoroti perjuangan partai politik bagi kepentingan perempuan sebagai alasan untuk memilih sebuah partai politik. Perlu pula dicatat bahwa tak satu pun responden perempuan yang menjadi pengurus dari sebuah partai politik.

Selanjutnya melalui tabel yang sama juga dapat dilacak alasan responden laki-laki dalam memilih sebuah partai politik. Tiga alasan mereka yang menonjol secara berurutan sesuai dengan proporsi pernyataannya adalah : *Pertama*, sesuai dengan aspirasi politik yang dimiliki sejumlah 82,22%. *Kedua*, partai politik tersebut merupakan partai yang reformis sejumlah 66,67%. *Ketiga*, 44,44% diantara responden juga mempertimbangkan kesesuaian ideologi partai politik dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana halnya pada responden perempuan, mayoritas responden laki-laki (91,11%) tidak menjadikan perjuangan partai politik terhadap kepentingan perempuan sebagai sebuah alasan. Disamping itu, dalam proporsi yang sama mereka juga menolak partai politik pilihan mereka disebabkan oleh karena pilihan orang tua, istri, kerabat, atau atasannya. Hal lain adalah faktanya tidak satu pun responden laki-laki yang menjadi pengurus partai politik.

Bila ditilik lebih lanjut faktor apakah yang menjadi penentu dari pilihan responden dalam pemilu legislatif 2004? Pertanyaan kritis ini sebenarnya bisa dijadikan basis untuk mengidentifikasi pemilih rasional-otonom dengan pemilih tradisional-mobilisasi. Pemilih rasional-otonom adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena didasari pertimbangan dan kesadaran sendiri, misalnya dengan memperhatikan program-program partai. Sebaliknya pemilih tradisional-mobilisasi adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena dimobilisasi oleh orang lain, dan tidak peduli akan pertimbangan rasional.

Tabel 8 akan memberikan gambaran yang gamblang tentang dua tipe pemilih tersebut.

Tabel 8 : Faktor Penentu Pilihan Partai Responden dalam Pemilu Legislatif 2004

No.	Faktor penentu	Responden Perempuan		Responden Laki-laki	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pertimbangan sendiri	35	38,88	74	82,22
2.	Saran dari keluarga	40	44,44	12	13,33
3.	Pengaruh lingkungan	15	16,68	4	4,45
4.	Tekanan (mobilisir) pihak lain	0	0	0	0
J u m l a h		90	100	90	100

Sumber : Diolah dari data primer.

Data pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa sebagian besar responden perempuan yaitu sebesar 61,12% tergolong pada pemilih tradisional-mobilisasi. Sebab pilihan mereka didasari oleh saran dari keluarga dan pengaruh lingkungan. Berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi dengan responden perempuan, responden laki-laki mayoritas yaitu sejumlah 82,22% justru tergolong pemilih rasional-otonom, karena memilih atas dasar pertimbangannya sendiri. Mereka menentukan pilihannya relatif kebal (*immune*) terhadap intervensi, tekanan, atau pun paksaan dari pihak lain. Satu hal penting yang juga diungkapkan oleh data, bahwa tidak satu pun dari responden yang menyatakan bahwa pilihannya atas partai politik merupakan hasil dari tekanan (mobilisir) pihak lain.

2. Akses atau Tingkat Keterlibatan Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Akses menurut Eko (2004) adalah bagian dari makna substantif partisipasi politik. Akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance* yaitu mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses yaitu : *Pertama, inclusion* atau keterlibatan masyarakat secara terbuka yaitu menyangkut siapa yang terlibat. *Kedua, involvement* atau keikutsertaan yang berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi

siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana akses atau keterlibatan responden dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dicermati melalui penjarangan jawaban responden terhadap hal-hal sebagai berikut : (a) akses pada tahap pemungutan dan penghitungan suara meliputi ikut memilih, menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses penghitungan suara, menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (b) akses pada tahapan kampanye meliputi menjadi juru kampanye, panitia pelaksana, menjadi simpatisan/penggembira, menjadi tim sukses kandidat, dan memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (c) akses terhadap partai politik meliputi terdaftar sebagai anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, dan mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Tabel 9 : Akses atau Keterlibatan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Akses	Kategori Jawaban Responden Perempuan		Kategori Jawaban Responden Laki-laki	
		Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat
1.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara				
	a. ikut memilih dalam pemilu	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)
	b. menjadi panitia pelaksana pemungutan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	c. terlibat dalam proses penghitungan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
2.	Tahap kampanye				
	a. menjadi juru kampanye	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi panitia pelaksana	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi simpatisan/penggembara	15 (16,67%)	75 (83,33%)	34 (37,77%)	56 (62,23)
	d. menjadi tim sukses kandidat	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	e. memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
3.	Terhadap partai politik				
	a. terdaftar sebagai anggota	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi pengurus partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi relawan partai	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Data empiris tentang akses atau keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis akses yang terlihat tinggi yaitu : *Pertama*, akses atau keterlibatan dalam memilih (melakukan pemberian suara), dimana semua responden (100%) menyatakan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tersebut.

Kedua, sejumlah 20% responden juga memberikan pernyataan turut memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan. *Ketiga*, menjadi simpatisan/penggembara suatu partai dinyatakan oleh sejumlah 16,67% responden. Sedangkan jenis akses yang lain terlihat sangat rendah sekali, terutama sekali dalam hal-hal yang menuntut kecakapan/*skill* politik tertentu. Akses yang rendah tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, menjadi juru kampanye, serta menjadi tim sukses kandidat. Sedangkan akses terhadap partai politik juga sangat rendah pada hampir semua elemen pencermatan tentang hal-hal terkait dengan terdaftar sebagai anggota, menjadi pengurus partai, terlebih mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Dalam konteks ini tak satu pun dari responden perempuan yang menyatakan keterlibatannya. Hanya dalam bentuk sebagai relawan partai, akses atau keterlibatan responden perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu. Itupun dalam jumlah yang sangat kecil yaitu 3,33%.

Pelacakan yang sama terhadap responden laki-laki memberikan penjelasan bahwa mereka pun memiliki akses atau keterlibatan yang rendah. Responden memberikan pernyataan bahwa keterlibatan mereka yang lebih menonjol dalam hal pemberian suara (100%) dan menjadi simpatisan/penggembara dalam kampanye sebesar 37,77%. Meskipun secara keseluruhan responden laki-laki juga memiliki akses yang rendah dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu, namun manakala dibandingkan responden perempuan ternyata mereka memiliki tingkat akses atau keterlibatannya juga dalam hal berikut : (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (4) memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan ; dan (5) menjadi relawan partai. Hanya saja porsi yang terlibat dalam aktivitas ini hanya kecil, berkisar 3,33% - 8,89% saja.

Dari keseluruhan akses yang terjaring ternyata keterlibatan responden yang terbesar adalah dalam *moment* pemberian suara. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan (akses) perempuan dalam pemilu berada pada hirarkhi terendah. Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) tidak terlepas dari imej mereka tentang kehidupan politik. Menarik untuk dicermati pendapat salah seorang responden YS berikut ini.

“Bagi kami politik itu adalah suatu pembicaraan yang tidak perlu dilakukan di arena umum. Membicarakan kehidupan politik itu harus penuh kehati-hatian. Salah-salah cakap akan mendatangkan bala pada kita.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2007).

Dari pernyataan tadi tersirat secara jelas ketakutan etnis ini (perasaan traumatik) untuk berbicara politik apalagi untuk banyak terlibat dalam urusan politik seperti menjadi pengurus partai, penggerak massa dalam kampanye, ataupun menjadi pemantau dalam pemilu. Sebagaimana terungkap dari pandangan responden NS.

“Bagi saya pribadi, ikut dalam kegiatan partai atau aktifitas politik lainnya adalah sesuatu yang sangat sulit, karena waktu dan kesempatan untuk itu tidak ada. Selain mengurus keluarga, saya juga bekerja/dagang sehingga tidak ada lagi perhatian untuk partai ini dan itu.” (Wawancara tanggal 17 September 2007).

3. Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Kontrol merupakan kemampuan warganegara untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Dalam hal ini penjaringan kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang melalui pengungkapan hal-hal sebagai berikut : (a) pertimbangan dalam memilih kandidat caleg dan kandidat DPD ; (b) saksi dalam pemilu ; (c) pemantau dalam pemilu ; (d) mempelajari program partai politik khususnya yang memberdayakan perempuan ; (e) menentukan kesalahan-

kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat ; dan (f) mengawasi peluang terjadinya *money politic* dalam seluruh kegiatan pemilu.

Tabel 10 : Kontrol Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Kontrol	Pernyataan Responden Perempuan		Pernyataan Responden Laki-laki	
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1.	Pertimbangan dalam memilih kandidat.	43 (47,78%)	47 (52,22)	67 (74,44%)	23 (25,56%)
2.	Saksi dalam pemilu	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
3.	Pemantau dalam pemilu.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
4.	Mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan.	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
5.	Menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
6.	Mengawasi peluang terjadinya <i>money politic</i> .	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol responden, baik perempuan maupun laki-laki etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang berdasarkan data tabel 10 dapat dikatakan lemah. Hanya satu jenis kontrol yang bisa dilakukan yaitu saat memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat. Sebagian responden sudah bisa mengontrol sendiri ke mana dan kepada siapa mereka memberikan suaranya melalui pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari diri sendiri maupun orang tua, dan keluarganya. Kontrol dalam melakukan pilihan adalah sesuatu yang esensial dalam politik. Terutama dalam sejarah panjang perjuangan perempuan untuk eksis dalam mempertahankan hak politiknya. Selain itu kontrol yang dapat mereka lakukan hanya terhadap persoalan program khususnya isu pemberdayaan perempuan dan proporsi mereka yang terlibat pun rendah.

Namun kemandirian yang menggembirakan ini tidak diikuti oleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjaringan hal ini terhadap responden ternyata mengungkapkan bahwa secara umum dalam empat tema kontrol yang diamati, responden tidak mampu melakukan kontrol yang seharusnya bisa mereka lakukan. Lemahnya kontrol responden ditunjukkan oleh tidak satu pun dari responden perempuan maupun laki-laki yang dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu legislatif 2004 lalu. Hanya dalam jumlah sangat kecil responden perempuan maupun laki-laki yang menyatakan melakukan kontrol sebagai saksi dalam pemilu, proporsi masing-masing adalah 1,11% dan 3,33% saja.

Lemahnya kontrol yang mereka lakukan menurut pengakuan beberapa responden yang diwawancarai karena adanya faktor risiko, disamping itu juga rendahnya pengetahuan dan minat perempuan etnis Cina (Tionghoa) untuk berkecimpug di bidang politik.

C. Pembahasan

Triple discrimination yang dialami perempuan etnis Cina (Tionghoa) diharapkan akan segera hilang dengan berubahnya format politik sejak bergulirnya reformasi politik pada Mei 1998, hampir sepuluh tahun yang lalu. Jika ditelusuri lebih jauh upaya pencerahan hak-hak keturunan etnis Cina (Tionghoa) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.6 tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden yang mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan untuk merayakan upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina (Tionghoa) secara terbuka. Dua tahun berikutnya, Megawati selaku presiden waktu itu mengeluarkan Keppres No.191 tahun 2002 yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal yang lebih menggembirakan lagi bagi etnis Cina

(Tionghoa) adalah dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan “mengakhiri diskriminasi etnis sejak 11 Juli 2006”.

Momentum-momentum tersebut selayaknya dapat menjadi *entry point* bagi etnis Cina (Tionghoa) pada umumnya dan perempuan etnis Cina (Tionghoa) pada khususnya untuk lebih berkiprah di berbagai bidang, khususnya bidang politik yang selama ini teralienasi dari kehidupan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata perubahan-perubahan format politik tidak begitu berpengaruh dalam perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina (Tionghoa). Temuan penelitian memberikan penjelasan bahwa 61,12% responden perempuan memilih secara tradisional-mobilisasi karena memilih partai politik disebabkan oleh saran keluarga dan pengaruh lingkungan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tergolong sebagai pemilih yang rasional otonom, yang memilih atas dasar pertimbangan sendiri.

Sementara dilihat dari responden laki-laki etnis Cina (Tionghoa) ternyata sedikit kondisinya lebih baik karena prosentase pemilih yang rasional-otonom lebih banyak dibandingkan perempuan. Satu yang menarik adalah bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama tidak mengalami intimidasi dalam menentukan pilihannya atas partai politik.

Perilaku pemberian suara adalah tindakan memilih yang merupakan refleksi identifikasi kepartaian dan bermuara kepada preferensi politik individu memilih partai politik tertentu dalam suatu pemilu. Selama ini pemilu-pemilu yang digelar pada masa Orde Baru sangat berperan dalam memobilisasi perempuan untuk memberikan suaranya pada partai pemerintah. Realitas ini telah dilegalisasi oleh kepolitikan Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih untuk mempertahankan status quo.

Uhlen (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia.

Selanjutnya kepada partai apa pilihan mereka jatuhkan? Temuan penelitian menunjukkan partai unggulan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang adalah Partai Damai Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Selanjutnya bila ditinjau dari kesadaran gender yang seharusnya mereka miliki dalam menentukan kandidat caleg maupun kandidat DPD ternyata masih rendah. Justru yang lebih banyak mereka memilih tanpa pertimbangan jenis kelamin dari kandidat yaitu 52,22%.

Kesadaran gender (*gender awareness*) umumnya akan terbentuk apabila pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap perannya dalam politik serta pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang politik telah membudaya di dalam pribadi perempuan itu sendiri. Tanpa kesadaran ini mustahil dilakukan peningkatan dan pemberdayaan peran perempuan di bidang politik.

Menarik untuk mencermati penelitian Rosenthal (1995) yang menunjukkan bahwa adanya preferensi politik berdasarkan perbedaan seks atau gender. Ia mengemukakan bahwa para pemilih perempuan lebih suka memilih kandidat sesama perempuan, bahkan diantara perempuan sendiri terdapat perbedaan preferensi pilihan politik berdasarkan kesadaran gender. Lebih lanjut penelitian Cook (1993) menunjukkan bahwa perempuan yang mempunyai kesadaran feminisme cukup besar berbeda dengan wanita yang kurang memiliki kesadaran feminisme dalam hal sikap dan nilai politik, khususnya perbedaan dalam memilih kandidat dan pilihan politiknya pada saat pemilu.

Terlepas dari ada tidaknya kesadaran gender yang dimiliki oleh responden tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini relasi hubungan gender dikungkung oleh budaya patriarki yang menganggap laki-laki superior terhadap perempuan di

berbagai sektor kehidupan baik domestik mau pun publik. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse, 1996).

Konstruksi budaya yang demikian kemudian diikuti pula dengan karakter struktur dan sistem yang tidak mendukung keberadaan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam politik yang mengalami *triple discrimination* yaitu mereka terdiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan dan sering dijadikan target (sering direkayasa dan dikambinghitamkan) melalui tindak kekerasan maupun kerusuhan massal.

Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat secara alamiah atau pengkategorian masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (merit).

Diskriminasi yang telah lama dilakukan membuat sebagian besar perempuan etnis Cina (Tionghoa) sebetulnya tidak begitu peduli akan keadaan politik, mereka dapat dikatakan tidak memihak atau berkiblat ke politik mana pun. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup tenteram lahir bathin dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk politik. Hal ini terungkap dari akses mereka dalam pemilu legislatif 2004.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 13 jenis akses yang dijangar ternyata akses dalam memilih yang berkategori tinggi (baik). Sementara dalam kategori cukup akses memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan (20%), dan akses menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye (16,67%). Sisanya ternyata

tergolong sangat rendah yaitu : (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (4) menjadi juru kampanye ; (5) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (6) menjadi tim sukses kandidat ; (7) terdaftar sebagai anggota partai ; (8) menjadi pengurus partai ; (9) menjadi relawan partai ; dan (10) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Rendahnya akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu (kecuali pada akses ikut memilih) ternyata paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka lakukan. Temuan penelitian menunjukkan dari enam jenis kontrol yang diamati hanya pada kontrol *pertimbangan dalam memilih kandidat* saja yang dapat dikategorikan baik. Sementara itu sisanya yaitu kontrol mereka sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic* ditemukan sangat lemah. Kenyataan tersebut berlaku juga bagi responden laki-laki.

Akses dan kontrol merupakan bagian dari substansi partisipasi politik. Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik baik dalam bentuk akses dan kontrol pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu : (1) apatis, yaitu orang-orang yang menarik diri dari proses politik ; (2) spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut pemilu ; (3) gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik ; dan (4) pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk non konvensional seperti mengajukan petisi, mogok, unjuk rasa dan demonstrasi (Sastroatmodjo, 1995).

Bila merujuk pada pendapat Milbrath dan Goel, ternyata partisipasi perempuan etnis Cina (Tionghoa) tergolong pada tipe apatis dan menuju ke tipe spektator. Menarik untuk mencermati pendapat Kendrigen, bahwa untuk dapat ke

tipe gladiator, ada dua cara yang ditempuh secara internal yaitu : *Pertama*, secara psikologis, para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktis harus melawan kadar subjektifitasnya seperti mengurangi kadar emosi, berpikir rasional, dan jangan mengandalkan *feeling*, hilangkan egoisme. *Kedua*, secara politik perempuan harus lebih sering tampil di depan publik sehingga sosialisasi politik perempuan berada dalam perspektif yang lebih luas ketimbang seputar kasur dan dapur. Dalam konteks ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan rasa apatis dengan meningkatkan rasa kepedulian (*care*) terhadap dunia politik. Kemudian untuk dapat tampil sejajar dengan yang lainnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak partisipasi politik perempuan dan laki-laki etnis Cina (Tionghoa) melalui program khusus yang berfungsi sebagai *special treatment* bagi mereka untuk berkontribusi dalam bidang politik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beranjak dari temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ternyata masih bersifat tradisional-mobilisasi walaupun telah terjadi perubahan format politik yang telah membuka peluang bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang politik. Sifat tradisional-mobilisasi tercermin dari alasan responden dalam menentukan pilihan atas partai politik yang disebabkan oleh saran keluarga dan pengaruh lingkungan.
2. Akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut : (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (d) menjadi juru kampanye ; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (f) menjadi tim sukses kandidat ; (g); terdaftar sebagai anggota partai ; (h) menjadi pengurus partai ; (i) menjadi relawan partai ; dan (j) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Hanya dalam tiga jenis akses yang dapat digolongkan tinggi yaitu ikut memilih dalam pemilu. Sementara memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan dan menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye berada pada kategori cukup.
3. Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka berikan. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD. Sementara itu dalam hal kontrol

lainnya masih tergolong lemah. Dalam konteks ini tercakup kontrol terhadap hal-hal berikut : sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic*.

B. Saran

1. Diharapkan adanya usaha yang simultan dari semua pihak untuk dapat memberdayakan perempuan etnis Cina (Tionghoa) di bidang politik. Sinergisitas ini hendaknya dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Provinsi.
2. Bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) sendiri diharapkan adanya upaya memberdayakan diri melalui beberapa sarana pendidikan agar dapat memiliki akses dan kontrol yang baik dalam kehidupan politik umumnya dan aktifitas politik khususnya seperti even pemilu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Irawan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Alfian dan Melly G. Tan (Penyunting). (1988). *Kerangka Pembangunan dan Lepas Landas*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. (1974) *Comparative Politic Today*. Boston : Little Brown and Co.
- Budiardjo, Miriam. (1981). *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Gramedia.
- Czudnowski, Moshe M. (1976). *Comparing Political Behavior*. London : Sage Publication Inc.
- Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Erniwati. (2007). *Asap Hio dari Ranah Minang : Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta : Ombak.
- Freedman, Amy L. (2000). *Political Participation and Etnic Minorities : Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London : Routledge.
- Gaffar, Afan. (1991). "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif Nol.1 Vol.3*. Yogyakarta : FISIPOL-UGM.
- , (1992). *Javanese Voters : A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hendrik, Doni. (2003). *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Skripsi-FISIP Universitas Andalas.
- Huntington, Samuel P. Dan Joan M Nelson. (1976). *No Easy Choise : Political Participation in Developing Countries*. Massachusetts : Harvard University Press.
- Ihromi, T.O. (Penyunting). (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- International IDEA. (2000). *Penilaian Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : International IDEA.
- Kusuma, Indradi. (2002). *Diskriminasi dalam Praktek*. Jakarta : DPP-FKKBI.
- Mas'oed, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed.). (1989). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Moser, Caroline. (1989). "Gender Planing in Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs" dalam *World Development Volume 17 Number 11*.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Murniati, A. Nunuk P. (2004). *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Magelang : Indonesiatara.
- Sanit, Arbi. (1998). *Reformasi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saputra, Dianthus. (2001). "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No. 17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (1988). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Karunika.
- Stepan, Alfred (1978). *The State and Society Peru in Comparative Perspective*. Princenton University Press.
- Surakhmad, Winarno. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grassindo.
- Suryadinata, Leo. (1999). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta : LP3ES.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi, 16 Oktober 2003.
- Theodorson, George A. & Achilles G. Theodorson. (1979). *A Modern Dictionary of Sociology*. New York : Hagerstown, San Francisco, London : Barnes & Noble Books.
- Uhlen, Anders. (1997). *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Terjemahan Rofik Suhud. Bandung : Mizan.
- Vredenberg, J. (1979). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Yusuf, A, Muri. (1985). *Metodologi Penelitian I*. Padang : FIP IKIP Padang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Padang, Juni 2007

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Saudara
di
Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat
Padang.

Dengan hormat,

Pertama sekali, kami mendoakan semoga Bapak/Ibu/Saudara selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amien.

Selanjutnya, bersama ini sangat diharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan mengisi angket penelitian ini, dalam rangka menyelesaikan penelitian yang berjudul :

**PERILAKU PEMBERIAN SUARA, AKSES DAN KONTROL
PEREMPUAN ETNIS CINA (TIONGHOA)
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 DI KOTA PADANG**

Sangat diharapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat mengisi semua pertanyaan yang ada dalam angket ini sesuai dengan kondisi objektif yang dirasakan, dialami, dan dilakukan. Kerahasiaan jawaban terjamin, karena hal ini hanya untuk kepentingan akademik semata.

Demikianlah untuk dimaklumi, dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terimakasih.

Wassalam,

Tim Peneliti.

Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

A. Perilaku Pemberian Suara

1. Partai apakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih dalam pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu?

.....
.....

2. Dalam pemilihan calon legislatif dan calon anggota DPD calon berjenis kelamin apakah yang Bapak/Ibu/Saudara pilih?

Untuk legislatif : perempuan/laki-laki *)

Untuk DPD : perempuan/laki-laki *)

*) coret yang tidak perlu.

3. Alasan Bapak/Ibu/Saudara memilih jenis kelamin tertentu adalah :

- Laki-laki lebih berpendidikan, terampil dan dapat dipercaya untuk tugas-tugas politik.
- Laki-laki lebih cekatan dan berpengalaman dalam bidang politik.
- Perempuan lebih teliti dan mampu untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.
- Perempuan harus diberi kesempatan untuk maju karena selama ini keterlibatannya dalam bidang politik sangat rendah.

4. Alasan Bapak/Ibu/Saudara dalam memilih partai politik pada pemilu legislatif 2004 yang lalu adalah :

No.	Alasan	Ya	Tidak
1.	Ideologi partai politik sesuai dengan agama yang dianut.		
2.	Partai politik tersebut adalah partai yang reformis.		
3.	Sesuai dengan aspirasi politik yang dimiliki.		
4.	Partai politik tersebut memperjuangkan kepentingan perempuan.		
5.	Menjadi pengurus partai politik tersebut.		
6.	Partai politik tersebut disegani dan terikat dengannya.		
7.	Partai politik tersebut adalah pilihan orang tua, suami, kerabat, atau atasan.		

5. Faktor penentu Bapak/Ibu/Saudara dalam memilih partai pada pemilu legislatif 2004 adalah :
- Pertimbangan sendiri.
 - Saran dari keluarga.
 - Pengaruh lingkungan.
 - Dimobilisir (tekanan) pihak lain.

B. Akses atau keterlibatan dalam pemilu legislatif 2004.

Berikanlah tanda checklist (V) pada pernyataan yang sesuai dengan akses atau keterlibatan Bapak/Ibu/Saudara dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu.

No.	Jenis Akses	Kategori Jawaban	
		Terlibat	Tidak Terlibat
1.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara		
	a. ikut memilih dalam pemilu.		
	b. menjadi panitia pelaksana pemungutan suara.		
	c. terlibat dalam proses penghitungan suara.		
	d. menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.		
2.	Tahap kampanye		
	a. menjadi juru kampanye.		
	b. menjadi panitia pelaksana.		
	c. menjadi simpatisan/penggembira.		
	d. menjadi tim sukses kandidat.		
	e. memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan		
3.	Terhadap partai politik		
	a. terdaftar sebagai anggota.		
	b. menjadi pengurus partai.		
	c. menjadi relawan partai.		
	d. mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.		

C. Kontrol Politik

Berikanlah tanda checklist (V) pada pernyataan yang sesuai dengan kontrol politik yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu.

No.	Jenis Kontrol	Pernyataan	
		Ada	Tidak ada
1.	Pertimbangan dalam memilih kandidat.		
2.	Saksi dalam pemilu.		
3.	Pemantau dalam pemilu.		
4.	Mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan.		
5.	Menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat.		
6.	Mengawasi terjadinya <i>money politic</i> .		

**SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN PENELITIAN**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25131 Telp. (0751) 443450,
Operator 7051260, 7058691 Pes. 213 Fax. 443450, 7055628 E-mail : lpunp@telkom.net

Nomor : 417/H.35.2/PG/2007

20 Juni 2007

Lamp. : -

Hal : *Izin Penelitian*

Yth. : **Kepala Kesbanglinmas
Kota Padang
Di
Padang**

Dengan hormat.

Sehubungan dengan permohonan Peneliti Universitas Negeri Padang tanggal 20 Juni 2007, perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya Saudara memberi izin kepada nama :

Ketua Peneliti

Nama : **Dra. Al Rafni, M.Si.**

NIP : 132056198

Fak / Jur. : FIS / Ilmu Sosial Politik

Anggota Peneliti : 1. Drs. Suryanef, M.Si.

Untuk mengumpulkan data penelitian :

Judul : Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

Lokasi : Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat

Waktu : 1 Juni s/d 31 Oktober 2007

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Prof. Dr. H. Anas Yasin, MA.
NIP. 130365634

Tembusan :

- Rektor Universitas Negeri Padang
- Camat Padang Barat
- Anggota Peneliti
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT
KELURAHAN KAMPUNG PONDOK

Jln. Dobi VI No. 2 Padang Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47 /KKP-33/X/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Pemerintah Kota Padang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dra.AL RAFNI,M.Si
Tempat/Tgl lahir : Padang , 12 Oktober 1968
Pekerjaan : Dosen FIS UNP
A l a m a t : Komp Perm Pondok Pinang Blok C 16 Padang

Berdasarkan surat izin penelitian No 070.20.31/2007 tanggal 4 September 2007 yang mana nama yang tersebut diatas memang telah selesai mengadakan penelitian di wilayah Kelurahan Kampung Pondok semenjak tanggal 4 september s/d Desember 2007.

Demikianlah surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan seperlunya.

Padang, 29 Oktober 2007
An Lurah Kampung Pondok
Sekretaris





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070. 12. 94 / Kesbang.Pol/ 2007

Walikota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
Nomor : 417/H.35.2/PG/2007 tanggal 20 Juni 2007
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 18 Juli 2007

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : **Dra. AL RAFNI,M.Si**
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 12 Oktober 1968
Pekerjaan : Dosen FIS UNP
Alamat di Padang : **Kompl Perumahan Pondok Pinang Blok C 16**
Maksud Penelitian : Pengumpulan data dan informasi
Waktu/ Lama Penelitian : 3(tiga) bulan
Judul Penelitian/ Survey/PKL : **Perilaku Pemberian Suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang.**
Lokasi/ tempat Penelitian/Survey/PKL : Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat
Anggota Rombongan : Drs.Suryanef, M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 23 Juli 2007

An. WALIKOTA PADANG
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

SURYA BUDHI.SH
Kabidina Tk.I Nip. 050047513

Diteruskan kepada Yth.:

1. Camat Padang Barat
2. Lurah Kampung Pondok
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
- ④ Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG BARAT

Jln. Veteran No. 85 , ☎ 27471 Padang

Nomor : 070.20.31 / CEP. 2007
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 4 September 2007

Kepada Yth :
Lurah Kampung PONDOK
di
P a d a n g

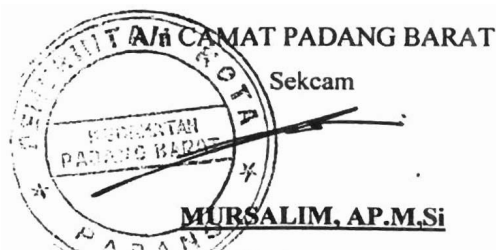
Dengan Hormat

Berdasarkan rekomendasi/ izin penelitian dari Wali Kota Padang Cq Kepala Kantor Kesbang - Pol Kota Padang No. 070.12.94//Kesbang- Pol/2007 tanggal 23 Juli 2007 dengan ini memberi persetujuan penelitian kepada :

Nama : Dra. AL RAFNI,M.Si
Tempat/ tgl Lahir : Padang. 12 Oktober 1968
Pekerjaan : Dosen FIS UNP
Alamat di Padang : Kompl. Perumahan Pondok Pinang Blok C 16
Waktu/ lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan
Judul Penelitian/ Survei : Perilaku Pemberian suara, Akses dan Kontrol Perempuan Etnis Cina (Tionghoa) dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang.

Akan mengadakan penelitian di wilayah Saudara sesuai dengan judul yang tersebut di atas, yang berlangsung pada tanggal 4 September s/d 4 Desember 2007,. Dengan ketentuan penelitian yang dilakukan yang bersangkutan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagai mana mestinya.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.



CURICULUM VITAE PENELITI

CURICULUM VITAE

Nama : Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP : 132056198.
Unit Asal : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang.
Pendidikan Terakhir : Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Alamat : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya
Padang 25173, Telp. 0751-482731.

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan :

1. Dosen FPIPS IKIP Padang (sekarang FIS-UNP) sejak tahun 1993.
2. Bendahara Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi FIS-UNP Padang (2001-2003).
3. Redaktur Pelaksana Jurnal Tingkap PKSBE FIS-UNP dan Jurnal Demokrasi PK-CIVIC FIS-UNP (2001 – sekarang)
4. Anggota Pusat Kajian HAM FIS-UNP Padang (2000-2004).

Penelitian dan Karya Ilmiah Lainnya (5 tahun terakhir) :

1. Penelitian

- a. Faktor-faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), (2001).
- b. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, (2002).
- c. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang, (2003).
- d. Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik, (2003). Kerjasama PSBE dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- e. Efektifitas Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Kota Padang, (2004). Kerjasama PKSBE dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- f. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (2004).

- g. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat , (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- h. Hubungan Kerjasama Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat, (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- i. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai di Kota Padang. (2005).
- j. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang, (2005).

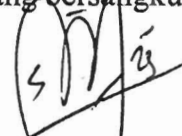
2. Karya Ilmiah Lainnya

- a. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- b. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 2000 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- c. Pengetahuan dan Sikap Perempuan Terhadap Kepolitikan Orde Baru, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).
- d. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2001 (Artikel Ilmiah pada Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- e. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, 2001 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- f. Kekuasaan dan Kepemimpinan Nagari Pasca UU No.5/1979 (Seminar Nasional Demokrasi Masyarakat Adat, Institute for Research and Empowerment Yogyakarta, 20-21 Oktober 2002).
- g. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Reformasi Politik (Seminar Nasional Kerjasama UNP dengan Indiana University, 23 Mei 2003).
- h. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, 2003. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- i. Isu dan Juru Kampanye Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, 2004. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- j. Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (dalam Buku Globalisasi, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, diterbitkan LP3ES, 2004).

- k. *Affirmative Action* : Langkah Kongkrit Menuju Partisipasi Politik Perempuan (Makalah disampaikan dalam forum Seminar Internasional, Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan Kerjasama Universitas Negeri Padang dengan Indiana University USA, 15 Maret 2005).
- l. Profil Kemampuan Manajemen Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan, dan Informasi-Komunikasi Penyelenggara Pemerintahan Nagari Serta Kendala yang Dihadapi, 2005 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Balitbang Provinsi Sumatera Barat).

Padang, 23 Maret 2006

Yang bersangkutan,



Dra. Al Rafni, M.Si.
NIP. 132056198

CURICULUM VITAE

Nama : Drs. Suryanef, M.Si.
NIP : 131945223.
Unit Asal : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang.
Pendidikan Terakhir : Program Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Alamat : Perumahan Pondok Pinang Blok C-16 Lubuk Buaya
Padang 25173, Telp. 0751-482731.

Pengalaman Jabatan/Pekerjaan :

1. Dosen FPIPS IKIP Padang (sekarang FIS-UNP) sejak tahun 1993.
2. Koordinator Publikasi Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi FIS-UNP Padang (2001-2003).
3. Redaktur Pelaksana Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP dan Jurnal Demokrasi PK-CIVIC FIS-UNP (2001 – sekarang)
4. Anggota Pusat Kajian HAM FIS-UNP Padang (2000-2004).

Penelitian dan Karya Ilmiah Lainnya (5 tahun terakhir) :

1. Penelitian

- a. Faktor-faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda dalam Pemilu 1997 (Kasus di Kotamadya Padang), (2001).
- b. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, (2002).
- c. Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) 2-5 : Lokus Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. (2002-2003). Kerjasama PSBE dengan The Asia Foundation.
- d. Pelaksanaan Kampanye Pemilu 1999 dan Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kota Padang, (2003).
- e. Pemberdayaan Masyarakat Adat di Indonesia : Lokus Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, (2003-2004). Kerjasama dengan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.
- f. Persepsi Masyarakat Minangkabau Terhadap Keterlibatan Perempuan dalam Politik, (2003). Kerjasama PSBE dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

- g. Efektifitas Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah di Kota Padang, (2004). Kerjasama PKSBE dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- h. Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Perempuan Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, (2004).
- i. Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- j. Hubungan Kerjasama Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Sumatera Barat, (2005). Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.
- k. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Legislatif oleh Partai di Kota Padang. (2005).

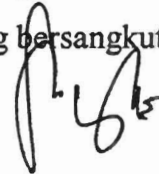
2. Karya Ilmiah Lainnya

- a. Reformasi Politik dan Implikasinya Terhadap Pengajaran PPKN, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- b. Menggusur Sang Prabu dari Rezim Neopatrimonial, 2000 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- c. Pengetahuan dan Sikap Perempuan Terhadap Kepolitikan Orde Baru, 2000 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).
- d. Pendekatan Ekonomi Politik : Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Politik, 2001 (Artikel Ilmiah pada Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- e. Mencari Format Ekonomi Kerakyatan, 2001 (Esai Tinjauan Buku dalam Jurnal Tingkat PKSBE FIS-UNP).
- f. Penelitian Kuantitatif dalam Ilmu Politik, 2004. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peranan Penelitian dalam Proses Pembelajaran, Kerjasama Lembaga Penelitian UNP dengan Lembaga Penelitian UNJ Jakarta).
- g. Perilaku Pemberian Suara Ditinjau dari Struktur Sosial Pemilih, 2003. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- h. Isu dan Juru Kampanye Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih, 2004. (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Analisa Politik FISIP UNAND).
- i. Kembali ke Nagari : Kembali ke Identitas dan Demokrasi Lokal (dalam Buku Globalisasi, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal, diterbitkan LP3ES, 2004).

- j. Kekuasaan dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Minangkabau, 2004. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi, HAM dan Pluralisme, 21-24 April 2004, Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta).
- k. Menyoal Demokrasi Lokal Pasca UU No.32 Tahun 2004. (Makalah disampaikan dalam forum Seminar Internasional Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan Kerjasama Universitas Negeri Padang dengan Indiana University USA, 15 Maret 2005).
- l. Penataan Penyelenggara Pemerintahan Nagari, 2005 (Artikel Ilmiah dalam Jurnal Balitbang Provinsi Sumatera Barat).

Padang, 23 Maret 2006

Yang bersangkutan,



Drs. Suryanef, M.Si.
NIP. 132056198

DRAF ARTIKEL ILMIAH

AKSES DAN KONTROL POLITIK PEREMPUAN ETNIS CINA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004 DI KOTA PADANG

Oleh : Al Rafni dan Suryanef

A. Pendahuluan

Di masa Orde Baru, perempuan didomestikasi secara politis yaitu mempolitisasi perempuan, menerapkan ideologi patriarki, mengkooptasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai alat mobilisasi politik disamping tentunya pemerintah melalui output berupa kebijakan-kebijakannya melakukan regulasi yang ketat terhadap perempuan. Uhlin (1997) mengungkapkan struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru telah turut berperan dalam menyokong otoritarianisme di Indonesia. Struktur hubungan gender dalam kepolitikan Orde Baru itu dapat ditemui dalam kebijakan-kebijakan sebagai output dari sistem politik.

Khusus untuk kaum perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina (etnis Tionghoa) kondisi diperparah lagi oleh rezim Orde Baru dengan melakukan politik diskriminasi, sehingga kebebasan politik warga keturunan etnis Cina pun terbelenggu (Hendrik, 2003). Perempuan etnis Cina mengalami *double discrimination* (diskriminasi ganda). Mereka didiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan. Bahkan menurut Saputra (2001) masih ada satu diskriminasi lagi (menjadi *triple discrimination*) khususnya buat kalangan etnis Cina di kota-kota besar, termasuk perempuan di dalamnya bahwa mereka sering menjadi target (seringkali direkayasa atau kambing hitam) kerusuhan massa atau pun tindak kekerasan.

Marjinalisasi politik yang dialami perempuan etnis Cina ditenggarai dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama beranggapan bahwa ketidakaktifan etnis Cina (termasuk perempuan) dalam bidang politik adalah bagian dari usaha mereka tidak menonjol dengan harapan dapat tetap mempertahankan posisi mereka di sektor

ekonomi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa sumber-sumber politik secara formal memang sengaja disumbat oleh penguasa supaya mereka selalu bergantung kepada kekuasaan politik dan mereka bisa dijadikan 'sapi perah' ekonomi dan sekaligus 'kambing hitam' jika ada masalah-masalah sosial ekonomi yang akut (Saputra, 2001).

Salah satu even politik yang banyak melibatkan kaum perempuan termasuk di dalamnya perempuan etnis Cina adalah even pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pemilu turut ditentukan oleh partisipasi memilih kaum perempuan. Dengan adanya reformasi politik diharapkan marjinalisasi politik perempuan etnis Cina bergerak ke arah pencerahan kehidupan politik termasuk kiprahnya dalam pemilu. Untuk itu menarik diteliti *bagaimanakah akses dan kontrol perempuan etnis Cina dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang?*

Dalam upaya menemukan jawaban atas masalah penelitian, maka diperlukan pemahaman yang tepat tentang akses dan kontrol politik serta bagaimana posisi perempuan dalam seting politik Indonesia. Ketiga hal tersebut akan dipaparkan berikut ini.

Berbicara tentang akses dan kontrol merupakan dua hal yang menjadi inti dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan pemerataan hak-hak politik bagi seluruh rakyat atau warga negara dan dimungkinkannya seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi politik menyangkut kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam rangka menghilangkan rintangan-rintangan pembangunan. Selain itu, partisipasi politik juga berarti bahwa keputusan-keputusan politik dalam pembangunan bertujuan pada distribusi kekuasaan politik yang lebih egaliterian. Sedangkan pada tingkat yang paling dasar, partisipasi politik tercermin dalam peran serta masyarakat dalam partai politik, serikat pekerja dan lain-lain (Amien Rais dalam Alfian, dkk., 1988).

Sementara itu, Huntington dan Nelson menurut Afan Gaffar dalam tulisannya

Partisipasi Politik di Indonesia menggolongkan partisipasi politik ke dalam bentuk kegiatan yang disebutnya : (1) *electoral activities* yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ; (2) *lobbying* yaitu aktivitas individual ataupun kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun pemimpin politik untuk mempengaruhi keputusan mereka tentang sesuatu hal ; (3) *organizational activities* yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan dukungan terhadap suatu organisasi tersebut, dan terlibat dalam aktivitas organisasi untuk mempengaruhi pemerintah ; (4) *contacting* yaitu tindakan individu yang menghubungi secara langsung pejabat pemerintah untuk menyampaikan segala sesuatu persoalannya ; dan (5) *violence* atau tindakan yang berbentuk unjuk rasa bahkan kekerasan politik dapat juga dikategorikan sebagai partisipasi politik. (Prospektif No.1 Volume 3, 1991).

Dengan demikian partisipasi politik dapat mengambil berbagai bentuk dengan ruang lingkup yang sangat luas. Mulai dari pembuatan keputusan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan politik, pemilu, diskusi politik, keanggotaan dalam partai dan kelompok politik, kontak dengan pejabat politik dan pemerintahan sampai dengan tindakan-tindakan politik dalam bentuk kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, kudeta, revolusi dan lain-lain.

Makna terdalam partisipasi politik menurut Sutoro Eko (2004) adalah *voice*, akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan kehidupannya. Lebih jauh Eko (2004) memberi kejelasan terhadap makna substantif partisipasi itu sebagai berikut :

Pertama, *voice* adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ada dua hal penting dalam akses :

keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kaum miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan dan lain-lain.

Ketiga, kontrol merupakan kemampuan warga melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Beranjak dari pemaparan esensi partisipasi sebelumnya dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik akan menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Artinya perempuan bukanlah sebagai hamba (*client*) tetapi sebagai warga (*citizen*) sehingga ia adalah pribadi yang utuh dan mempunyai hak untuk memiliki. Selain itu perempuan sebagai bagian dari segmen masyarakat juga akan menjadi *partner* dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk tidak menjadi sekadar objek pasif penerima kebijakan melainkan sebagai subjek aktif menentukan kebijakan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa partisipasi politik memberi peluang bagi keterlibatan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengambil peran dalam proses politik. Membicarakan keterlibatan perempuan Etnis Cina dalam kehidupan politik di Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari kajian seputar keterlibatan perempuan Indonesia secara umum dalam bidang politik. Uniknyanya adalah bahwa keterlibatan perempuan etnis Cina di Indonesia mengalami marjinalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka termarjinalisasi dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarjinalisasi di kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Cina di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang (Freedman, 2000).

Walaupun sebagai etnis minoritas namun jaminan hukum atas aktifitas politik mereka tetap sama sebagaimana pemerintah memberikan jaminan yuridis formal melalui beberapa regulasinya kepada seluruh WNI tanpa kecuali. Jaminan yuridis yang diberikan melalui UUD 1945 adalah merupakan langkah awal bagi perempuan dan laki-laki WNI untuk masuk ke dunia politik. Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa peraturan perpolitikan di Indonesia yang memberikan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.
- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing (Isbodroini Suyanto, 2003).

Secara umum partisipasi politik etnis Cina di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Cina (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Cina antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw) (Suryadinata, 1992). Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom) yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan

penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan strategi mereka mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik (Saputra, 2001).

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Cina pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan menjadikan Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sebagai lokus penelitian. Hal ini disebabkan besarnya jumlah komunitas Cina (Tionghoa) yang berdomisili di sini. Responden penelitian berjumlah 180 orang etnis Cina (Tionghoa) yang terdiri dari masing-masing 90 orang perempuan dan 90 orang lainnya laki-laki. Pengambilan sampel menggunakan Formula Frank Lynch (Surakhmad, 1989). Sementara itu pengumpulan data menggunakan angket serta wawancara mendalam. Sedangkan analisis data menggunakan metoda statistik prosentase normal (Yusuf,

1985) untuk data kuantitatif dan analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman (1979) untuk data kaulitatif. Disamping itu juga menggunakan analisis gender dalam memotret perbedaan akses dan kontrol politik antara perempuan dengan laki-laki etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui bagaimana akses atau keterlibatan responden dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang dicermati melalui penjaringan jawaban responden terhadap hal-hal sebagai berikut : (a) akses pada tahap pemungutan dan penghitungan suara meliputi ikut memilih, menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, terlibat dalam proses penghitungan suara, menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (b) akses pada tahapan kampanye meliputi menjadi juru kampanye, panitia pelaksana, menjadi simpatisan/penggembira, menjadi tim sukses kandidat, dan memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan ; (c) akses terhadap partai politik meliputi terdaftar sebagai anggota partai, menjadi pengurus partai, menjadi relawan partai, dan mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Data empiris tentang akses atau keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang yang terungkap melalui tabel 1, menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis akses yang terlihat tinggi yaitu : *Pertama*, akses atau keterlibatan dalam memilih (melakukan pemberian suara), dimana semua responden (100%) menyatakan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tersebut. *Kedua*, sejumlah 20% responden juga memberikan pernyataan turut memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan. *Ketiga*, menjadi simpatisan/ penggembira suatu partai dinyatakan oleh sejumlah 16,67% responden. Sedangkan jenis akses yang lain terlihat sangat rendah sekali, terutama sekali dalam hal-hal yang menuntut kecakapan/*skill* politik tertentu. Akses yang rendah tersebut berhubungan dengan hal-hal seperti menjadi panitia pelaksana pemungutan suara,

terlibat dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, menjadi juru kampanye, serta menjadi tim sukses kandidat. Sedangkan akses terhadap partai politik juga sangat rendah pada hampir semua elemen pencermatan tentang hal-hal terkait dengan terdaftar sebagai anggota, menjadi pengurus partai, terlebih mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Dalam konteks ini tak satu pun dari responden perempuan yang menyatakan keterlibatannya. Hanya dalam bentuk sebagai relawan partai, akses atau keterlibatan responden perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu. Itupun dalam jumlah yang sangat kecil yaitu 3,33%.

Pelacakan yang sama terhadap responden laki-laki memberikan penjelasan bahwa mereka pun memiliki akses atau keterlibatan yang rendah. Responden memberikan pernyataan bahwa keterlibatan mereka yang lebih menonjol dalam hal pemberian suara (100%) dan menjadi simpatisan/penggembira dalam kampanye sebesar 37,77%. Meskipun secara keseluruhan responden laki-laki juga memiliki akses yang rendah dalam pemilu legislatif 2004 yang lalu, namun manakala dibandingkan responden perempuan ternyata mereka memiliki tingkat akses atau keterlibatannya juga dalam hal berikut : (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (2) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (4) memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan ; dan (5) menjadi relawan partai. Hanya saja porsi yang terlibat dalam aktivitas ini hanya kecil, berkisar 3,33% - 8,89% saja.

Dari keseluruhan akses yang terjaring ternyata keterlibatan responden yang terbesar adalah dalam *moment* pemberian suara. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan (akses) perempuan dalam pemilu berada pada hirarkhi terendah. Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) tidak terlepas dari imej mereka tentang kehidupan politik. Menarik untuk dicermati pendapat salah seorang responden YS berikut ini.

“Bagi kami politik itu adalah suatu pembicaraan yang tidak perlu dilakukan di arena umum. Membicarakan kehidupan politik itu harus penuh kehati-hatian. Salah-salah cakap akan mendatangkan bala pada kita.” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2007).

Dari pernyataan tadi tersirat secara jelas ketakutan etnis ini (perasaan traumatik) untuk berbicara politik apalagi untuk banyak terlibat dalam urusan politik seperti menjadi pengurus partai, penggerak massa dalam kampanye, ataupun menjadi pemantau dalam pemilu. Sebagaimana terungkap dari pandangan responden NS.

“Bagi saya pribadi, ikut dalam kegiatan partai atau aktifitas politik lainnya adalah sesuatu yang sangat sulit, karena waktu dan kesempatan untuk itu tidak ada. Selain mengurus keluarga, saya juga bekerja/dagang sehingga tidak ada lagi perhatian untuk partai ini dan itu.” (Wawancara tanggal 17 September 2007).

Tabel 1 : Akses atau Keterlibatan Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Akses	Kategori Jawaban Responden Perempuan		Kategori Jawaban Responden Laki-laki	
		Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat
1.	Tahap pemungutan dan penghitungan suara				
	a. ikut memilih dalam pemilu	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)
	b. menjadi panitia pelaksana pemungutan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	c. terlibat dalam proses penghitungan suara	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
2.	Tahap kampanye				
	a. menjadi juru kampanye	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi panitia pelaksana	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi simpatisan/penggembira	15 (16,67%)	75 (83,33%)	34 (37,77%)	56 (62,23)
	d. menjadi tim sukses kandidat	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	e. memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
3.	Terhadap partai politik				
	a. terdaftar sebagai anggota	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	b. menjadi pengurus partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
	c. menjadi relawan partai	3 (3,33%)	87 (96,67%)	8 (8,89%)	82 (91,11%)
	d. mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol merupakan kemampuan warganegara untuk melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah serta penilaian secara kritis reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.

Dalam hal ini penjarangan kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang melalui pengungkapan hal-hal sebagai berikut : (a) pertimbangan dalam memilih kandidat caleg dan kandidat DPD ; (b) saksi dalam pemilu ; (c) pemantau dalam pemilu ; (d) mempelajari program partai politik khususnya yang memberdayakan perempuan ; (e) menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat ; dan (f) mengawasi peluang terjadinya *money politic* dalam seluruh kegiatan pemilu.

Tabel 2 : Kontrol Responden dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Padang

No.	Jenis Kontrol	Pernyataan Responden Perempuan		Pernyataan Responden Laki-laki	
		Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1.	Pertimbangan dalam memilih kandidat.	43 (47,78%)	47 (52,22)	67 (74,44%)	23 (25,56%)
2.	Saksi dalam pemilu	1 (1,11%)	89 (98,89%)	3 (3,33%)	87 (96,67%)
3.	Pemantau dalam pemilu.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
4.	Mempelajari program partai khususnya isu pemberdayaan perempuan.	18 (20%)	72 (80%)	8 (8,88%)	82 (91,12%)
5.	Menentukan kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu di TPS setempat.	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)
6.	Mengawasi peluang terjadinya <i>money politic</i> .	0 (0%)	90 (100%)	0 (0%)	90 (100%)

Sumber : Diolah dari data primer.

Kontrol responden, baik perempuan maupun laki-laki etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang berdasarkan data tabel 2 dapat dikatakan lemah. Hanya satu jenis kontrol yang bisa dilakukan yaitu saat memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat. Sebagian responden sudah bisa

mengontrol sendiri ke mana dan kepada siapa mereka memberikan suaranya melalui pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari diri sendiri maupun orang tua, dan keluarganya. Kontrol dalam melakukan pilihan adalah sesuatu yang esensial dalam politik. Terutama dalam sejarah panjang perjuangan perempuan untuk eksis dalam mempertahankan hak politiknya. Selain itu kontrol yang dapat mereka lakukan hanya terhadap persoalan program khususnya isu pemberdayaan perempuan dan proporsi mereka yang terlibat pun rendah.

Namun kemandirian yang menggembirakan ini tidak diikuti oleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Penjaringan hal ini terhadap responden ternyata mengungkapkan bahwa secara umum dalam empat tema kontrol yang diamati, responden tidak mampu melakukan kontrol yang seharusnya bisa mereka lakukan. Lemahnya kontrol responden ditunjukkan oleh tidak satu pun dari responden perempuan maupun laki-laki yang dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu legislatif 2004 lalu. Hanya dalam jumlah sangat kecil responden perempuan maupun laki-laki yang menyatakan melakukan kontrol sebagai saksi dalam pemilu, proporsi masing-masing adalah 1,11% dan 3,33% saja.

Lemahnya kontrol yang mereka lakukan menurut pengakuan beberapa responden yang diwawancarai karena adanya faktor risiko, disamping itu juga rendahnya pengetahuan dan minat perempuan etnis Cina (Tionghoa) untuk berkecimpug di bidang politik.

Triple discrimination yang dialami perempuan etnis Cina (Tionghoa) diharapkan akan segera hilang dengan berubahnya format politik sejak bergulirnya reformasi politik pada Mei 1998, hampir sepuluh tahun yang lalu. Jika ditelusuri lebih jauh upaya pencerahan hak-hak keturunan etnis Cina (Tionghoa) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Keppres No.6 tahun 2000 ketika Gus Dur menjadi presiden yang mencabut Inpres No.14 tahun 1967 tentang pelarangan untuk merayakan upacara agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Cina (Tionghoa)

secara terbuka. Dua tahun berikutnya, Megawati selaku presiden waktu itu mengeluarkan Keppres No.191 tahun 2002 yang menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hal yang lebih menggembirakan lagi bagi etnis Cina (Tionghoa) adalah dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan “mengakhiri diskriminasi etnis sejak 11 Juli 2006”.

Momentum-momentum tersebut selayaknya dapat menjadi *entry point* bagi etnis Cina (Tionghoa) pada umumnya dan perempuan etnis Cina (Tionghoa) pada khususnya untuk lebih berkiprah di berbagai bidang, khususnya bidang politik yang selama ini teralienasi dari kehidupan mereka.

Kesadaran gender (*gender awareness*) umumnya akan terbentuk apabila pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap perannya dalam politik serta pentingnya pemberdayaan perempuan di bidang politik telah membudaya di dalam pribadi perempuan itu sendiri. Tanpa kesadaran ini mustahil dilakukan peningkatan dan pemberdayaan peran perempuan di bidang politik.

Menarik untuk mencermati penelitian Rosenthal (1995) yang menunjukkan bahwa adanya preferensi politik berdasarkan perbedaan seks atau gender. Ia mengemukakan bahwa para pemilih perempuan lebih suka memilih kandidat sesama perempuan, bahkan diantara perempuan sendiri terdapat perbedaan preferensi pilihan politik berdasarkan kesadaran gender. Lebih lanjut penelitian Cook (1993) menunjukkan bahwa perempuan yang mempunyai kesadaran feminisme cukup besar berbeda dengan wanita yang kurang memiliki kesadaran feminisme dalam hal sikap dan nilai politik, khususnya perbedaan dalam memilih kandidat dan pilihan politiknya pada saat pemilu.

Terlepas dari ada tidaknya kesadaran gender yang dimiliki oleh responden tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini relasi hubungan gender dikungkung oleh budaya patriarki yang menganggap laki-laki superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik mau pun publik. Patriarki adalah konsep

bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peranan penting dalam masyarakat dan pemerintahan serta mencerabut perempuan dari aksesnya terhadap kekuasaan (Mosse, 1996).

Konstruksi budaya yang demikian kemudian diikuti pula dengan karakter struktur dan sistem yang tidak mendukung keberadaan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam politik yang mengalami *triple discrimination* yaitu mereka terdiskriminasi bukan saja karena mereka berasal dari etnis minoritas tetapi juga karena mereka perempuan dan sering dijadikan target (sering direkayasa dan dikambinghitamkan) melalui tindak kekerasan maupun kerusuhan massal.

Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang berdasarkan perbedaan yang dibuat secara alamiah atau pengkategorian masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (merit).

Diskriminasi yang telah lama dilakukan membuat sebagian besar perempuan etnis Cina (Tionghoa) sebetulnya tidak begitu peduli akan keadaan politik, mereka dapat dikatakan tidak memihak atau berkiblat ke politik mana pun. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup tenteram lahir bathin dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk politik. Hal ini terungkap dari akses mereka dalam pemilu legislatif 2004.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 13 jenis akses yang dijangin ternyata akses dalam memilih yang berkategori tinggi (baik). Sementara dalam kategori cukup akses memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan (20%), dan akses menjadi simpatisan/penggembara dalam kampanye (16,67%). Sisanya ternyata tergolong sangat rendah yaitu : (1) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (2)

terlibat dalam proses penghitungan suara ; (3) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (4) menjadi juru kampanye ; (5) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (6) menjadi tim sukses kandidat ; (7) terdaftar sebagai anggota partai ; (8) menjadi pengurus partai ; (9) menjadi relawan partai ; dan (10) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Rendahnya akses atau tingkat keterlibatan perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu (kecuali pada akses ikut memilih) ternyata paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka lakukan. Temuan penelitian menunjukkan dari enam jenis kontrol yang diamati hanya pada kontrol *pertimbangan dalam memilih kandidat* saja yang dapat dikategorikan baik. Sementara itu sisanya yaitu kontrol mereka sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic* ditemukan sangat lemah. Kenyataan tersebut berlaku juga bagi responden laki-laki.

Akses dan kontrol merupakan bagian dari substansi partisipasi politik. Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik baik dalam bentuk akses dan kontrol pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu : (1) apatis, yaitu orang-orang yang menarik diri dari proses politik ; (2) spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut pemilu ; (3) gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik ; dan (4) pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk non konvensional seperti mengajukan petisi, mogok, unjuk rasa dan demonstrasi (Sastroatmodjo, 1995).

Bila merujuk pada pendapat Milbrath dan Goel, ternyata partisipasi perempuan etnis Cina (Tionghoa) tergolong pada tipe apatis dan menuju ke tipe spektator. Menarik untuk mencermati pendapat Kendrigen, bahwa untuk dapat ke tipe gladiator, ada dua cara yang ditempuh secara internal yaitu : *Pertama*, secara

psikologis, para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktis harus melawan kadar subjektifitasnya seperti mengurangi kadar emosi, berpikir rasional, dan jangan mengandalkan *feeling*, hilangkan egoisme. *Kedua*, secara politik perempuan harus lebih sering tampil di depan publik sehingga sosialisasi politik perempuan berada dalam perspektif yang lebih luas ketimbang seputar kasur dan dapur. Dalam konteks ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan rasa apatis dengan meningkatkan rasa kepedulian (*care*) terhadap dunia politik. Kemudian untuk dapat tampil sejajar dengan yang lainnya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak partisipasi politik perempuan dan laki-laki etnis Cina (Tionghoa) melalui program khusus yang berfungsi sebagai *special treatment* bagi mereka untuk berkontribusi dalam bidang politik.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Beranjak dari temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut : (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (d) menjadi juru kampanye ; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (f) menjadi tim sukses kandidat ; (g); terdaftar sebagai anggota partai ; (h) menjadi pengurus partai ; (i) menjadi relawan partai ; dan (j) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai. Hanya dalam tiga jenis akses yang dapat digolongkan tinggi yaitu ikut memilih dalam pemilu. Sementara memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan dan menjadi simpatisan/penggembara dalam kampanye berada pada kategori cukup.

- b. Rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka berikan. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD. Sementara itu dalam hal kontrol lainnya masih tergolong lemah. Dalam konteks ini tercakup kontrol terhadap hal-hal berikut : sebagai saksi dan pemantau dalam pemilu, mempelajari program partai politik yang memberdayakan perempuan, menentukan kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan pemilu di TPS setempat, dan kontrol terhadap peluang terjadinya *money politic*.

2. Saran

- a. Diharapkan adanya usaha yang simultan dari semua pihak untuk dapat memberdayakan perempuan etnis Cina (Tionghoa) di bidang politik. Sinergisitas ini hendaknya dikoordinir oleh Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Provinsi.
- b. Bagi perempuan etnis Cina (Tionghoa) sendiri diharapkan adanya upaya memberdayakan diri melalui beberapa sarana pendidikan agar dapat memiliki akses dan kontrol yang baik dalam kehidupan politik umumnya dan aktifitas politik khususnya seperti even pemilu.

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atas kepercayaan dan dukungan finansial yang diberikan.

2. Lembaga Penelitian UNP dan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang memberi dukungan administratif.
3. Para responden penelitian yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi angket dan diwawancarai dalam rangka pengumpulan data.

F. Daftar Pustaka

- Alfian dan Melly G. Tan (Penyunting). (1988). *Kerangka Pembangunan dan Lepas Landas*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Freedman, Amy L. (2000). *Political Participation and Ethnic Minorities : Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and United States*. London : Routledge.
- Gaffar, Afan. (1991). "Partisipasi Politik di Indonesia" dalam *Prospektif Nol.1 Vol.3*. Yogyakarta : FISIPOL-UGM.
- Hendrik, Doni. (2003). *Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu 1999 di Kota Padang*. Skripsi-FISIP Universitas Andalas.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1979). *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saputra, Dianthus. (2001). "Marginalisasi Perempuan Cina (Tionghoa) di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan No.17*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Surakhmad, Winarno. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung : Tarsito.
- Suryadinata, Leo. (1999). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta : LP3ES.
- Suyanto, Isbodroini. (2003). *Persiapan Perempuan Menghadapi Pemilu 2004*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI di Bukittinggi, 16 Oktober 2003.

Uhlen, Anders. (1997). *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Terjemahan Rofik Suhud. Bandung : Mizan.

Yusuf, A, Muri. (1985). *Metodologi Penelitian I*. Padang : FIP IKIP Padang.

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

A. Topik dan Perumusan Masalah

Topik penelitian lanjutan yang akan dilakukan adalah :

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN ETNIS CINA (TIONGHOA) KOTA PADANG TERHADAP KEPOLITIKAN PASCA ORDE BARU

Temuan penelitian tentang perilaku pemberian suara, akses dan kontrol perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif menunjukkan bahwa perilaku pemberian suara perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu legislatif 2004 di Kota Padang ternyata masih bersifat tradisional-mobilisasi walaupun telah terjadi perubahan format politik yang telah membuka peluang bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang politik. Sementara itu akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu secara umum rendah terutama dalam hal-hal berikut : (a) menjadi panitia pelaksana pemungutan suara ; (b) terlibat dalam proses penghitungan suara ; (c) menjadi saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ; (d) menjadi juru kampanye ; (e) menjadi panitia pelaksana kampanye ; (f) menjadi tim sukses kandidat ; (g) terdaftar sebagai anggota partai ; (h) menjadi pengurus partai ; (i) menjadi relawan partai ; dan (j) mengikuti proses rekrutmen caleg oleh partai.

Di sisi lain temuan penelitian juga mengungkapkan rendahnya akses perempuan etnis Cina (Tionghoa) dalam pemilu. Hal ini paralel dengan lemahnya kontrol yang mereka berikan. Kontrol yang dapat mereka lakukan hanya dalam memberikan pertimbangan untuk memilih kandidat baik untuk caleg mau pun anggota DPD.

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan terhadap aktifitas politik perempuan termasuk perempuan etnis Cina. Terlebih dengan pembaharuan-pembaharuan kebijakan yang dilakukan Gus Dur sebagai presiden terpilih awal pasca Orde Baru, yaitu mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Cina seperti barongsai dan kisah-kisah bernuansa Cina, serta menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional, semakin memberi ruang bagi etnis Cina untuk menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu menarik

untuk diteliti : *Bagaimanakah orientasi politik perempuan etnis Cina Kota Padang terhadap kepolitikan pasca Orde Baru ?*

Pengungkapan orientasi politik perempuan etnis Cina tersebut, terkait dengan orientasi kognitif, orientasi afektif, maupun orientasi evaluatif serta harapan-harapan mereka terhadap sistem politik yang akan datang dapat memberikan kontribusi penting bagi penentuan langkah-langkah pemberdayaan mereka di bidang politik. Dengan demikian para pembuat kebijakan dapat meletakkan kepentingan politik perempuan khususnya perempuan etnis Cina sebagai agenda yang pantas mendapat perhatian.

Secara umum masalah yang akan diteliti dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagaimana orientasi politik perempuan etnis Cina terhadap kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatifnya ?
2. Apakah harapan-harapan perempuan etnis Cina terhadap sistem politik pasca Orde Baru ?

B. Rancangan Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Dalam mengungkapkan jawaban atas pertanyaan penelitian maka akan dilakukan kajian literatur yang berhubungan dengan dua poin krusial berikut, yaitu : (a) orientasi politik ; dan (b) perempuan etnis Cina dalam kehidupan politik di Indonesia.

a. Orientasi Politik

Beberapa kajian penting berhubungan dengan orientasi politik akan mengungkapkan pengklasifikasian terhadap orientasi politik yang terdiri atas : *Pertama*, orientasi *cognitive* yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap sistem politik, peran dan pejabat yang menjalankan peran itu dalam sistem politik, termasuk proses input dan output dari sistem politik. *Kedua*, orientasi *affective* atau perasaan terhadap sistem politik tersebut dan *performance* sistem politik itu. *Ketiga*, orientasi *evaluative* yaitu memberikan penilaian dan opini tentang obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar-standar nilai dan kriteria yang berkenaan

dengan informasi dan perasaan. Senada dengan pendapat ini pada bagian lain *Almond* dan *Powell* (1978) juga mengungkapkan tiga orientasi individu terhadap politik, hanya saja perbedaannya mereka memasukkan aspek perasaan senang atau tidak senang (*favourable* atau *unfavourable*) terhadap obyek-obyek politik atau sistem politik secara keseluruhan. Obyek politik yang disoroti oleh ketiga ahli tersebut adalah : *Pertama*, peranan atau struktur khusus dalam sistem politik seperti badan legislatif, eksekutif ataupun birokrasi. *Kedua*, pemegang jabatan seperti pemimpin partai, legislator dan administrator. *Ketiga*, kebijaksanaan, keputusan atau penguatan keputusan dalam bentuk proses pembuatan dan penerapan keputusan tersebut. Sedangkan menurut *Muller* (1977) sebagaimana dikutip *Ratnawati* (1993) obyek politik yang harus dicermati adalah parlemen, pemerintahan nasional, penegak hukum, lembaga peradilan yang bebas dan aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap obyek-obyek politik tersebut akan menggambarkan bagaimana orientasi kognitifnya terhadap suatu model kepolitikan. Sedangkan orientasi afektifnya menurut *Nelson* (*Ratnawati*, 1993) dapat dikelompokkan menjadi *lima tipe sikap politik* yaitu *political involvement*, *political efficacy*, *political trust*, *civic awareness* dan *community political knowledge*.

Political involvement dalam hal ini menunjukkan sebagai suatu sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik, juga menyangkut suatu kecenderungan untuk mendiskusikan politik dengan orang lain serta suatu pemahaman tentang isu-isu politik. Sikap ini merefleksikan nilai-nilai umum yang menempatkan individu pada potensi keefektifan cara memecahkan masalah politik secara umum.

Tipe kedua adalah *political efficacy*. Dalam hal ini merefleksikan pandangan seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Bila warga negara menampilkan suatu "*sense of political efficacy*" yang tinggi maka mereka memberikan nilai yang tinggi terhadap peranan mereka dalam arena politik. Sementara itu tipe ketiga yaitu *political-trust* yang merefleksikan nilai yang diberikan oleh warga negara terhadap otoritas politik.

Selanjutnya tipe keempat adalah *civic awareness*, dalam hal ini menunjukkan refleksi nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap kesejahteraan masyarakat,

khususnya individu yang mengetahui tentang masalah kemasyarakatan dan sadar akan hal itu serta mempunyai sikap untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Tipe kelima adalah *community political knowledge* dimana sikap pada tipe ini berkaitan dengan dua sikap sebelumnya. Sikap ini terefleksi dari tindakan individu yang sadar tentang situasi riil politik yang terjadi dalam masyarakat dengan bagaimana ia harus bersikap.

Selanjutnya orientasi evaluatif warga negara terhadap obyek politik secara operasional dapat dicermati pandangan warga negara terhadap sistem politik yang ada dengan membandingkan nilai-nilai politik yang dijalankan oleh sistem apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Nilai-nilai politik ideal yang dianut individu sangat ditentukan oleh seberapa jauh individu tersebut terlibat dalam proses sosialisasi politik.

Orientasi politik sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat ditentukan oleh bekerjanya suatu sistem politik. Suasana bekerjanya sistem politik dalam suatu rezim disebut dengan kepolitikan. Kepolitikan Orde Baru mencerminkan suasana yang otoriter dan tidak demokratis. Afan Gaffar (1996) lebih jauh merinci beberapa indikator yang membuktikan tidak demokratisnya kepolitikan Orde Baru. *Pertama*, kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. *Kedua*, rotasi kekuasaan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa. *Ketiga*, rekrutmen politik tertutup. *Keempat*, penyelenggaraan pemilu yang jauh dari demokratis. *Kelima*, masyarakat belum sepenuhnya menikmati hak-hak dasarnya seperti kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat dan yang lainnya (Gaffar, 1992).

Dalam hubungannya dengan penelitian ini orientasi politik perempuan dicermati melalui : *Pertama, orientasi kognitif* meliputi pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu sistem politik pada umumnya, yang meliputi pemahamannya terhadap peranan struktur, fungsi dan rekrutmen lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam supra struktur politik, yang meliputi lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD Presiden (eksekutif), MA (yudikatif), dan BPK) serta berbagai lembaga yang terbentuk seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya. Selain itu juga lembaga-lembaga yang berada dalam

tataran infra struktur politik seperti peranan partai politik, fungsi partai politik dalam masyarakat dan adanya organisasi-organisasi kepentingan lainnya. Juga dicermati pengetahuan seputar pemilu dan pengetahuan warga negara akan hak dan kewajiban bernegara dan bermasyarakat, dan pengetahuan seputar kepolitikan pasca Orde Baru, baik menyangkut bekerjanya sistem kepolitikan pasca Orde Baru secara umum yang dilihat melalui : (1) lembaga-lembaga pemerintahan, parlemen, lembaga peradilan ; (2) kebijakan atau keputusan yang dihasilkan sebagai output dalam kepolitikan ; (3) dari segi aktor atau kepemimpinan dari elit politik.

Kedua, orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik yang meliputi perasaan terhadap kepolitikan Orde Baru. Perasaan terhadap sistem politik terwujud dalam tataran *lima tipe sikap* yaitu sikap yang melibatkan suatu interes yang tergeneralisir dalam politik juga menyangkut sikapnya terhadap isu-isu politik (*political involvement*), tipe sikap kedua menyangkut *political efficacy* yaitu sikap seseorang terhadap peranannya sendiri dalam sistem politik. Tipe sikap ketiga yaitu *political trust* yang merefleksikan nilai yang diberikan warga negara terhadap pelaksanaan otoritas politik. Tipe sikap keempat yaitu sikap warga negara dalam upaya memajukan kesejahteraan bersama (*civic awareness*), serta tipe sikap kelima yaitu *community political knowledge* yaitu sikap yang terefleksi dari individu terhadap situasi riil politik yang terjadi pada masyarakat seperti sikapnya terhadap reformasi politik, dan lain-lain.

Ketiga, orientasi evaluatif warga negara (dalam hal ini wanita) terhadap sistem politik yang ada dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai politik ideal yang dianut oleh individu. Dengan demikian perlu pula dikaji usaha-usaha individu dalam melakukan proses sosialisasi politik. Melalui keseluruhan proses mencermati orientasi politik perempuan tersebut dalam politik, selanjutnya akan diketahui harapan-harapan perempuan terhadap sistem politik pasca kejatuhan Soeharto. Dengan teridentifikasinya harapan-harapan perempuan terhadap sistem politik merupakan suatu langkah awal menuju pemberdayaan perempuan di bidang politik.

b. Perempuan Etnis Cina dalam Kehidupan Politik di Indonesia

Keterlibatan perempuan etnis Cina di Indonesia mengalami marjinalisasi yang berlapis atau *double* bahkan *triple discrimination*. Pertama, mereka

termarginalisasi dalam kehidupan politik dikarenakan mereka perempuan. Kedua, mereka termarginalisasi di kehidupan politik karena mereka berasal dari etnis minoritas yang seringkali menjadi 'sasaran' bagi penguasa dalam mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang akut. Dikatakan etnis minoritas karena jumlah populasi etnis Cina di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang (kurang dari 3%) dari total populasi seluruh Indonesia yang berjumlah 202 juta orang (Freedman, 2000).

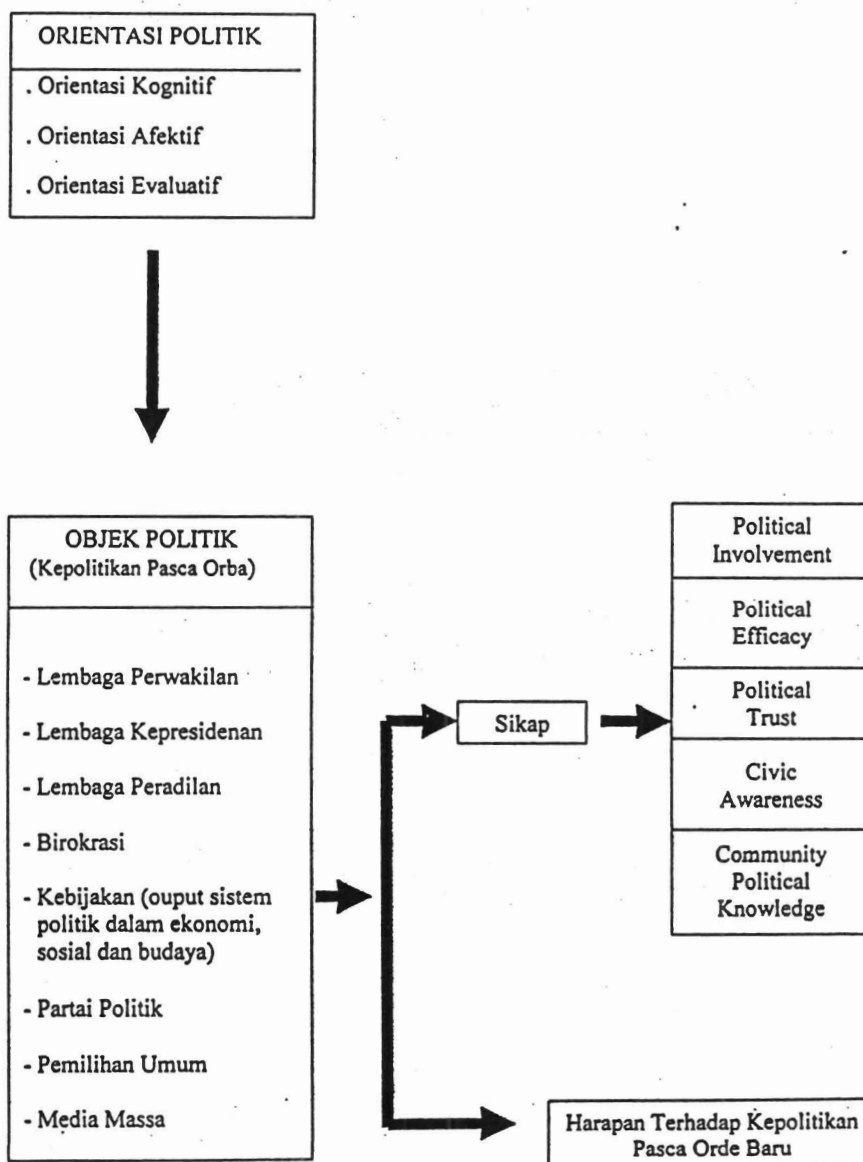
Secara umum partisipasi politik etnis Cina di Indonesia dibagi dalam dua bentuk. Pertama, secara formal melalui partai politik berasimilasi dimana masyarakat etnis Cina (baik perempuan atau laki-laki) yang tertarik pada politik dapat berpartisipasi melalui partai politik pribumi. Sebagai contoh pada masa Orde Baru berintegrasi dengan Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Para tokoh terkenal dari etnis Cina antara lain Yusuf Wanandi (nama asli Liem Bian Kie), Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dan Djoko Sudyatmiko (Lie Giok Hauw) (Suryadinata, 1992). Kedua, bentuk partisipasi informal mencakup aktivitas organisasi-organisasi non politik dan kelompok-kelompok penekan. Sebut saja contohnya Badan Komunikasi (Bakom) yang dibentuk Pemerintah Orde Baru tahun 1977 yang berfungsi sebagai badan penghubung antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa. Contoh lain organisasi Prasetya Mulya yang didirikan tahun 1980 merupakan sebuah yayasan yang berkepentingan membantu pemerintah melaksanakan program-program sosial. Eksistensi kelompok-kelompok penekan dari etnis Tionghoa ini tidak terlalu menonjol. Dalam konteks ini terdapat pandangan bahwa ketidakaktifan etnis Tionghoa dalam bidang politik merupakan strategi mereka mempertahankan posisi di sektor ekonomi. Disamping itu juga ada pandangan yang menyatakan bahwa tidak aktifnya etnis ini di bidang politik sebagai implikasi dari kebijakan penguasa yang menyumbat sumber-sumber politik formal. Tujuannya adalah untuk membangun ketergantungan mereka kepada kekuasaan politik (Saputra, 2001).

Perubahan format politik ke arah yang lebih demokratis membawa pencerahan bagi etnis minoritas ini untuk berkiprah dalam bidang politik. Satu langkah kongkrit yang ditempuh pada era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah mencabut berbagai kebijakan yang menyangkut pencekalan budaya etnis Tionghoa

seperti barongsai, yang kembali hadir di tengah-tengah perayaan imlek dan kisah-kisah bernuansa Cina pun bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu.

c. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan tinjauan pustaka sebelumnya serta permasalahan yang menjadi fokus kajian, maka dapat kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagaimana yang tampak pada diagram berikut ini.



2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Disamping itu sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian berperspektif gender. Menurut Amal penelitian yang berperspektif gender adalah penelitian yang berusaha mengangkat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kehidupannya bermasyarakat, yang mencakup pula hubungan gender didalamnya (Ihromi, 1995). Penelitian seperti ini menggunakan pendekatan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*).

Informan penelitian diambil secara *purposive random sampling* (Patton, 1990) dengan menggunakan *criterion based selection* artinya peneliti menetapkan informan penelitian berdasarkan kebutuhan, terutama dalam menentukan siapa yang akan menjadi informan dan berapa jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini maka informan penelitian ini adalah perempuan etnis Cina terutama yang berdomisili di Kelurahan Kampun Pondok Kecamatan Padang Barat karena di sini terkonsentrasi sejumlah 3.892 (28,75%) dari keseluruhan etnis Cina Kota Padang.

Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara mendalam (*depth interview*). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan bersifat terbuka dan tertutup serta pedoman wawancara. Sementara itu untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.

Akhirnya analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) sebagai berikut : (1) reduksi data ; (2) penyajian data ; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi ; (4) merumuskan temuan. Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan pada bagian jenis penelitian bahwa penelitian ini juga berperspektif gender sehingga analisis gender.